

**PENDUDUKAN VIETNAM DI KAMBOJA
TAHUN 1979-1989**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

Program Studi Pendidikan Sejarah



Disusun oleh :

WAHYU PURWANINGSIH

NIM : 93 1314 006

NIRM : 930051120604120006

PENDIDIKAN SEJARAH

PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2002

**PENDUDUKAN VIETNAM DI KAMBOJA
TAHUN 1979-1989**

Oleh :

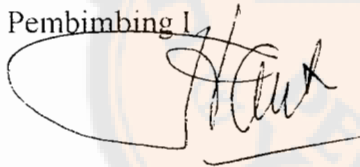
WAHYU PURWANINGSIH

NIM : 93 1314 006

NIRM : 930051120604120006

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I



Drs. A.K. Wiharyanto, M.M.

Tanggal 24 April 2002

Pembimbing II



Drs. Sutarjo Adisusilo J.R.

Tanggal 25 April 2002

PENDUDUKAN VIETNAM DI KAMBOJA

TAHUN 1979 - 1989

Dipersiapkan dan ditulis oleh :

WAHYU PURWANINGSIH

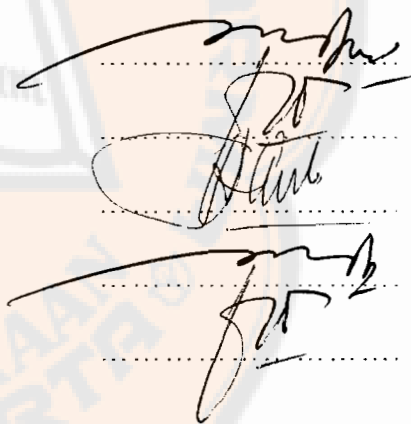
NIM : 93 1314 006

NIRM : 930051120604120006

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 20 Mei 2002
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Drs. Sutarjo Adisusilo J.R.
Sekretaris : Drs. B. Musidi, M.Pd.
Anggota : Drs. A.K. Wiharyanto, M.M.
Anggota : Drs. Sutarjo Adisusilo J.R.
Anggota : Drs. B. Musidi, M.Pd.



Yogyakarta, 20 Mei 2002

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sanata Dharma



Dekan,

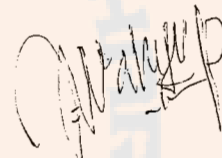
DR. AM. Slamet Soewandi, M.Pd.

Pernyataan Keaslian Karya

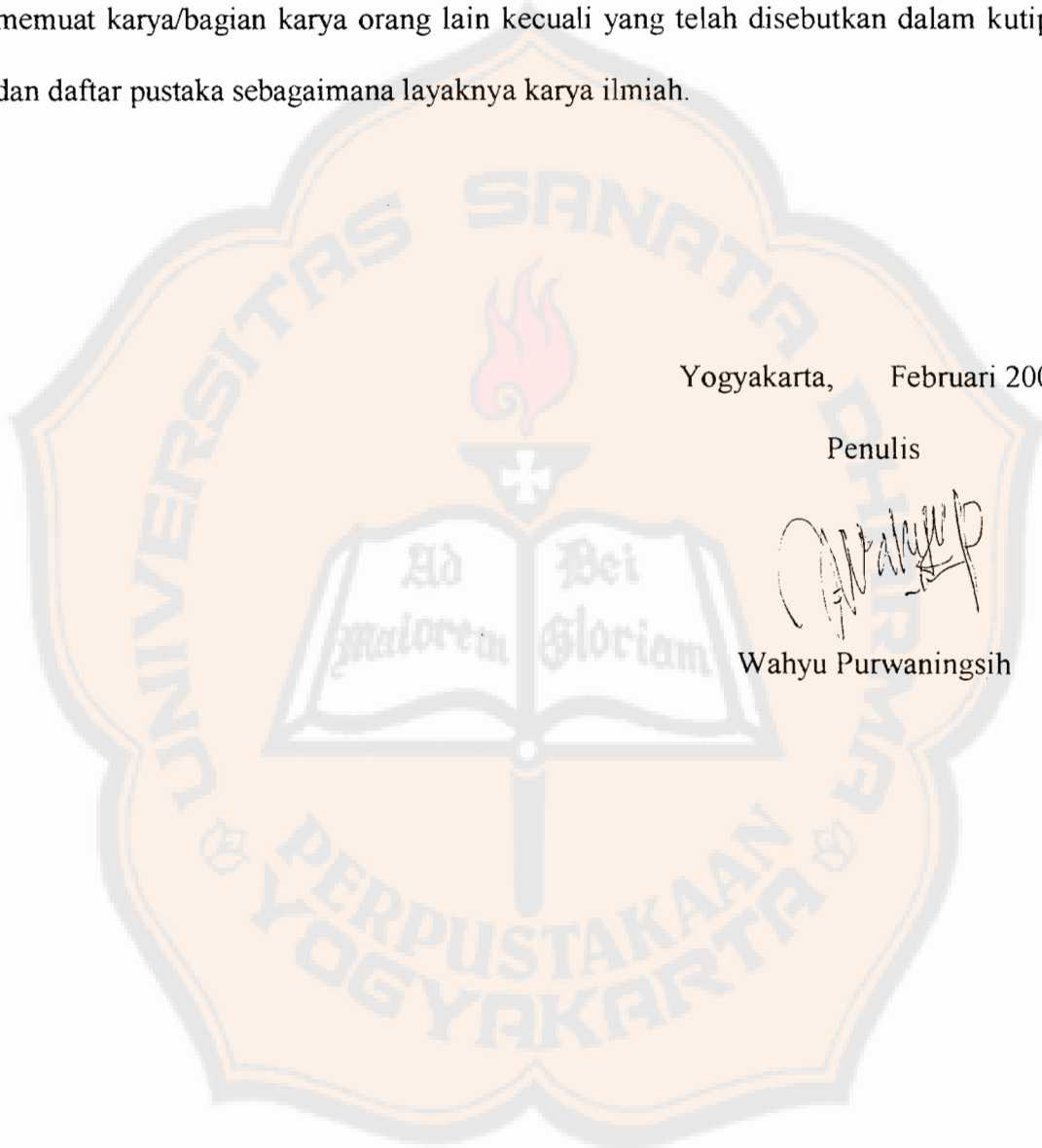
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya/bagian karya orang lain kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, Februari 2002

Penulis



Wahyu Purwaningsih



ABSTRAK

Wahyu Purwaningsih, 2002, *Pendudukan Vietnam di Kamboja Tahun 1979-1989*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Skripsi ini membahas tentang Pendudukan Vietnam di Kamboja periode 1979-1989. Penelitian ini mendeskripsikan situasi wilayah Kamboja menjelang terjadinya pendudukan Vietnam di wilayah Kamboja, serta upaya penyelesaian yang dilakukan, baik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertikai maupun oleh negara-negara tetangga terutama perhimpunan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN).

Penelitian ini menggunakan metode penulisan sejarah yang mencakup empat tahap penulisan yaitu heuristik, kritik sumber (verifikasi data), interpretasi, dan historiografi. Sedangkan sumber yang digunakan sebagai acuan penelitian adalah sumber sekunder, dan penelitian ini merupakan studi pustaka.

Karena dalam menjalankan pemerintahannya dianggap radikal dan juga kejam, maka muncullah pemberontakan yang menentang Pemerintahan Pol Pot yang didukung oleh Vietnam dan kelompok ini bernama KNUFS yang dipimpin oleh Heng Samrin. Pada tanggal 25 Desember 1978, Vietnam melakukan serangan besar-besaran ke wilayah Kamboja, kemudian tanggal 7 Januari 1979, dibentuklah pemerintahan yang baru yaitu Republik Rakyat Kamboja (PRK) yang dipimpin oleh Heng Samrin.

Pemerintahan Heng Samrin dukungan Vietnam dan Uni Soviet ini ditentang oleh kelompok-kelompok pejuang Khmer Merah yaitu kelompok Sihanouk, Son Sann, dan Khieu Samphan. Kemudian mereka membentuk Pemerintahan Koalisi yaitu CGDK, perlawanan mereka dilakukan dengan taktik gerilya, di samping itu perlawanan mereka juga mendapatkan bantuan terutama dari RRC.

ASEAN mengupayakan penyelesaian bagi masalah Kamboja yaitu dengan memprakarsai pertemuan di antara negara-negara yang bertikai, di antaranya Pertemuan Informal Jakarta (JIM). Di samping itu upaya penyelesaian juga dilakukan oleh negara luar yang terlibat, seperti adanya kesepakatan antara RRC – Uni Soviet, perbaikan hubungan RRC – Vietnam. Dan yang penting adalah ditariknya pasukan Vietnam dari Kamboja pada bulan September 1989, dan dimulainya kehidupan Kamboja tanpa campur tangan negara lain.

ABSTRACT

Wahyu Purwaningsih, 2002, *The Vietnam Occupation in Cambodia 1979-1989*, Sanata Dharma University, Yogyakarta.

This research discussed about the Vietnam occupations in Cambodia in 1979 – 1989. The research described the situation in Cambodia in the time when Vietnam would have occupationed in Cambodia, and many efforts to do from those fought parties or ASEAN.

The research used historical writing method, which involved four steps. They were heuristically, source criticism (data verification), interpretation, and historiography. The source used in the research was secondary source, and this research was a library research.

Because in running the country, he was considered radical and cruel, then there was a rebellion against Pol Pot Governmental supported by Vietnam and this group was named KNUFS ied by Heng Samrin. On December 25, 1978, Vietnam did an attack to Cambodia, then on January 7, 1979, there was a new government, and it was Republic of Cambodia People Ied by Heng Samrin.

Vietnam and Uni Soviet but some groups of fighters supported Heng Samrin, they were Sihanouk, Son Sann, and Khieu Sampan. Then, they farmed a coalition government the was CGDK. They did guerilla. Besides that Republic of Chinese People supported them.

ASEAN tried to make a good solution for the problem in Cambodia that was by giving an initiative to make meetings between them. One those was Jakarta Informal Meeting. Besides that, some countries also were involved, for example. There was an agreement between China and Uni Soviet. The most important thing was that the armies of Vietnam and Cambodia retreated in 1989, and there was a start of new life in Cambodia without others interfere.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Pendudukan Vietnam di Kamboja Tahun 1979-1989. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna meraih gelar Sarjana Pendidikan Sejarah di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam mencari dan mengolah data untuk skripsi ini melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan tulus hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala bantuan dan dukungan dalam bentuk apapun yang telah diberikan kepada penulis sejak proses awal penulisan sampai selesainya skripsi ini. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
2. Bapak Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
3. Bapak Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
4. Bapak Drs. AK. Wiharyanto, M.M., selaku Pembimbing I yang dengan sabar telah membimbing dan memberi saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. S. Adisusilo J.R., selaku Pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

6. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah membantu penulis selama menjalani pendidikan di Universitas Sanata Dharma.
7. Kepala dan staff Perpustakaan Universitas Sanata Dharma, staff Perpustakaan Daerah dan staff Perpustakaan Hatta Yogyakarta yang telah melayani dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam mengumpulkan sumber-sumber pustaka guna penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman Pendidikan Sejarah yang telah memberi dukungan, motivasi dan bantuan baik moril maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis dengan senang hati dan terbuka untuk menerima kritik serta saran dari para pembaca yang budiman. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi semua pihak untuk menambah khasanah pengetahuan tentang sejarah Asia Tenggara khususnya pada masa pendudukan Vietnam di Kamboja.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
GLOSARY.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	6
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Manfaat Penulisan.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metodologi Penelitian.....	8
G. Landasan Teori.....	9
H. Sistematika.....	11
BAB II. SITUASI KAMBOJA MENJELANG PENDUDUKAN VIETNAM	
A. Sekilas tentang Kamboja.....	14
1. Letak Geografis.....	14

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Ekonomi	15
3. Penduduk	16
B. Situasi Kamboja menjelang Pendudukan Vietnam.....	17
1. Masa Pemerintahan Pol Pot.....	17
2. Front Persatuan Nasional Penyelamat Kamboja	23
BAB III. PENDUDUKAN VIETNAM DI KAMBOJA	
A. Jatuhnya Pemerintahan Pol Pot.....	28
B. Reaksi Rakyat Kamboja.....	34
1. Pembentukan Pemerintahan Koalisi.....	34
2. Perang Gerilya	43
C. Posisi Hubungan RRC dan Uni Soviet terhadap Masalah Pendudukan Vietnam di Kamboja	46
D. Posisi Thailand dengan Terjadinya Pendudukan Vietnam	50
BAB IV. UPAYA PENYELESAIAN MASALAH PENDUDUKAN VIETNAM DI KAMBOJA	
A. Faktor Penghambat Upaya Penyelesaian	54
B. Peran ASEAN dalam Upaya Penyelesaian Masalah Kamboja.....	56
C. Upaya Internasional dalam Penyelesaian Masalah Kamboja	61
D. Penarikan Pasukan Vietnam dari Kamboja.....	64
BAB V. KESIMPULAN	67
DAFTAR PUSTAKA	71

GLOSARY

- ASEAN** : Assosiation of South East Asia Nation
(Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara)
- CGDK** : Coalition Government of Demokratik Kampuchea
(Pemerintahan Koalisi Demokratik Kamboja)
- CPT** : Communist Party of Thailand (Partai Komunis Thailand)
- ICK** : International Conference on Kampuchea
(Konferensi Internasional tentang Kamboja)
- JIM** : Jakarta Informal Meeting (Pertemuan Informal Jakarta)
- KNUFNS** : Kampuchean National United Front for National Salvation
(Front Persatuan Nasional Penyelamat Kamboja)
- KPNLF** : Kampuchean People's National Liberation Front
(Front Pembebasan Nasional Rakyat Kamboja)
- PRK** : People's Republic of Kampuchea (Republik Rakyat Kamboja)
- PBB** : Perserikatan Bangsa-Bangsa
- RRC** : Republik Rakyat Cina

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kamboja merupakan salah satu negara kecil yang termasuk dalam kawasan Asia Tenggara dan masyarakatnya mayoritas keturunan bangsa Khmer. Sebagian besar rakyat Kamboja menganut agama Budha, maka di wilayah Kamboja banyak dijumpai sejumlah kuil dan yang terbesar adalah Angkor Wat. Bangunan ini bukan saja merupakan bangunan keagamaan bagi rakyat Kamboja, tetapi juga merupakan kenangan masa kejayaan bagi bangsa mereka.

Kamboja pernah mengalami masa kejayaan yaitu pada waktu masih berbentuk kerajaan Kamboja, bahkan mempunyai daerah yang cukup luas yaitu sebelah Barat hampir mencapai Birma, di sebelah Timur dan Tenggara berbatasan dengan kerajaan Champa dan di bagian Selatan hampir seluruh bagian Vietnam, sedangkan di sebelah Utara hampir mencapai daerah perbatasan antara Laos dan Republik Rakyat Cina. Seiring dengan berjalannya waktu, wilayah yang tadinya cukup luas lambat laun mulai menyempit, karena wilayah tersebut justru menjadi arena perebutan kekuasaan dan perluasan daerah yang dilakukan Muangthai dan Vietnam. Bahkan wilayah yang luas itu nyaris menjadi daerah taklukan dari Muangthai dan Vietnam dalam abad XVIII dan abad XIX.

Dengan terjadinya ekspansi masa lalu dari bangsa Vietnam ke wilayah Kamboja yang tentunya makin mempersempit beberapa segi wilayah Kamboja, mengakibatkan timbulnya perasaan anti yang tertanam di kalangan bangsa

Kamboja. Perasaan tidak senang terhadap orang-orang Vietnam ini juga didorong dengan banyaknya bangsa Vietnam yang masuk ke Kamboja sebagai akibat kebijaksanaan pemerintah kolonial Perancis dalam program perkebunan dan administrasi Kamboja. Yang membuat orang-orang Kamboja merasa kesal karena orang-orang Vietnam ini banyak berperan dalam bidang ekonomi dan birokrasi di Kamboja dibanding dengan orang-orang Kamboja sendiri.¹

Pada tahun 1953, Kamboja mendapatkan kemerdekaan secara penuh yang kemudian diakui internasional melalui Konferensi Perdamaian Jenewa pada musim panas tahun 1954. Di sana disebutkan bahwa kedaulatan atas wilayah Kamboja diserahkan kepada Pangeran Norodom Sihanouk. Setelah mencapai kemerdekaan bukan situasi Kamboja yang menjadi tenang, karena diantara bangsa Kamboja sendiri terdapat perselisihan terutama dengan kaum komunis Kamboja. Kaum komunis Kamboja ini tergabung dalam Front Persatuan Nasional yang beranggotakan sebagian mahasiswa Kamboja seperti Khieu Samphan, Ieng Sary, Saloth Sar, dan Son Sann. Mereka tidak diijinkan ikut dalam konferensi Jenewa, sebagai akibatnya sebagian dari mereka terpaksa lari ke Hanoi karena merasa kecewa sedang sebagian lain mengadu nasib mereka dengan pemerintahan Pangeran Norodom Sihanouk yang diberi kekuasaan penuh atas wilayah Kamboja.² Hal ini berbeda dengan yang terjadi pada kelompok komunis di dua negara Indocina lainnya yaitu Vietnam dan Laos. Kaum komunis di Vietnam mendapatkan kekuasaan Vietnam Utara sedangkan Partai Pathet Lao di Laos

¹ AR. Sutopo "Beberapa Segi Konflik Vietnam-Kamboja Menuju Hegemoni Kawasan". *Analisa* tahun VII No. 2, Februari 1978, hal. 84

² Bing Lukman. "Indocina Sparing Partner ASEAN". Dalam *Analisa* tahun VII No. 8, Agustus 1977, hal. 26

memperoleh pijakan kekuasaan di propinsi bagian utara. Malah kelompok komunis Kamboja dipaksa untuk mengakui kekuasaan raja tanpa diakui haknya sebagai kekuatan politik. Hal ini membuat kaum komunis Kamboja merasa kesal apalagi ternyata kelompok komunis Vietnam memandang sikap mereka sebagai taktik untuk konsolidasi gerakan komunis di Indocina, dengan tuduhan seperti itu maka kaum komunis Kamboja memutuskan hubungan dengan Partai Komunis Indocina dan membentuk Partai Rakyat Kamboja. Hal ini yang dimungkinkan timbulnya benih perselisihan antara kaum komunis Kamboja dengan kaum komunis Vietnam.³

Pada masa pemerintahan Pangeran Norodom Sihanouk ternyata Partai Rakyat Kamboja mendapat dukungan dari sebagian rakyat, tetapi dalam setiap pemilihan anggota dewan, partai mengalami kekalahan dan ini diduga karena adanya intimidasi pemilih oleh polisi, gangguan terhadap para calon, dan juga pemenjaraan anggota partai. Hal ini juga terlihat dengan adanya konsolidasi kekuasaan dan penyingkiran partai oposisi oleh pemerintahan Sihanouk pada tahun 1958. Tetapi Sihanouk juga memperoleh oposisi dari kalangan Angkatan Bersenjata yang anti komunis di bawah pimpinan Jendral Lon Nol. Pada waktu terjadi perang saudara di Vietnam, pemerintahan Sihanouk lebih condong pada Vietnam Utara.⁴ Kemudian muncul kebijaksanaan Sihanouk tentang diperbolehkannya pasukan Vietnam Utara masuk ke wilayah Kamboja, ternyata

³ Pada saat terbentuk Front Persatuan Nasional, mereka bertujuan untuk membantu Vietnam dalam memperjuangkan kemerdekaan dari Perancis dan kelompok ini dikenal dengan sebutan Vietminh Khmer, maka sewajarnya bila kaum komunis Kamboja mengharapkan dukungan dari kelompok komunis Vietnam

⁴ Sihanouk terbawa sikap anti terhadap musuh lama yaitu kerajaan Annam di bawah Bao Dai yang berada di wilayah Vietnam Selatan dan pernah menjajah sebagian wilayah kerajaan Kamboja

kebijaksanaan ini justru dimanfaatkan oleh Vietnam Utara untuk menyerang Vietnam Selatan melalui wilayah Kamboja. Hal ini menimbulkan kecemasan keras dari orang-orang Kamboja sendiri, keadaan ini membuat Sihanouk merasa tidak berdaya dan ia memutuskan pergi ke Paris untuk beristirahat. Sementara itu untuk urusan pemerintahan, Sihanouk memberikan mandat kepada Lon Nol sebagai kepala pemerintahan “penyelamat”.⁵ Akhirnya Lon Nol memanfaatkan kesempatan ini untuk menggulingkan pemerintahan Sihanouk dengan bantuan Amerika Serikat dan Vietnam Selatan pada tanggal 18 Maret 1979, dukungan ini diperoleh oleh Lon Nol karena adanya kebijaksanaan Sihanouk tentang diperbolehkannya pasukan Vietnam Utara masuk ke wilayah Kamboja.

Setelah Kamboja diperintah oleh Lon Nol, keadaan justru bertambah rumit. Hal ini disebabkan oleh tindakan pemerintahan Lon Nol yang melakukan aksi kekerasan terhadap orang-orang minoritas Vietnam di Kamboja, tentu saja peristiwa ini membuat orang-orang Vietnam menjadi benci terhadap pemerintahan Lon Nol. Dilain pihak rasa anti terhadap orang-orang Vietnam ternyata justru semakin berkembang dikalangan orang-orang Kamboja dan di antaranya kedua negara tersebut sering terjadi perselisihan. Adapun yang menjadi pokok permasalahannya ialah masalah perbatasan, sebenarnya masalah perbatasan ini sudah muncul sejak sekitar abad XVIII dan abad XIX (masa ekspansi Vietnam di Kamboja) dan terus berlangsung sampai negara-negara di kawasan Indocina mencapai kemedekaannya.

⁵ Francois Ponchaud. *Cambodia Year Zero*. (New York : Halt Rinehart and Winston, 1978), hal. 161

Setelah Kamboja merdeka dan berada di bawah pimpinan Khmer Merah, masalah kedaulatan territorial/perbatasan wilayah diungkit kembali. Dan hal ini merupakan salah satu sebab tidak harmonisnya hubungan antara Vietnam dengan Kamboja. Dengan semakin gencarnya masalah perbatasan ini di antara kedua negara tersebut, maka sering terjadi insiden di perbatasan antara Vietnam dan Kamboja, mereka saling tuduh seperti pada saat Vietnam menuduh Kamboja menekan penduduk keturunan Vietnam yang tinggal di Kamboja, menyerbu wilayah Vietnam, dan merampok serta membunuh penduduk perbatasan.⁶

Masalah perbatasan antara Vietnam dan Kamboja bukan saja perbatasan di daerah dataran tetapi juga di daerah laut, tetapi masalah perdebatan tentang perbatasan laut tidak sampai menimbulkan pertempuran seperti halnya dengan masalah perbatasan darat.⁷ Tampaknya masalah perbatasan ini akan terus berlanjut bahkan pada tahun 1977 pemerintahan Kamboja mengumumkan pemutusan hubungan diplomatiknya dengan negara Vietnam, dilain pihak perang diperbatasan ternyata tidak dapat dielakkan lagi dan yang membuat dunia internasional semakin memperhatikan pertikaian kedua negara tersebut adalah serangan Vietnam secara besar-besaran dan melakukan pendudukan di wilayah Kamboja pada awal tahun 1979 sampai penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja dalam tahun 1989.

⁶ *Tempo* (tajuk), 13 Januari 1979

⁷ Pada tahun 1966 diadakan perundingan tentang perbatasan antara pemerintah Sihanouk, NLF Vietnam dan Republik Demokrasi Vietnam. Sebagai hasilnya ialah adanya pengakuan kaum komunis Vietnam bahwa pulau-pulau di sebelah utara garis Brevie (garis ini ditetapkan oleh Gubernur Jendral Indocina Perancis tahun 1939) adalah milik Kamboja. (lihat) Kirdi Dipoyudo, "Konflik Kamboja – Vietnam dan Akar-akarnya", *Analisa* tahun VIII No. 8, Agustus 1979, hal. 659

B. Rumusan Permasalahan

Bertolak dari uraian di atas, maka dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan. Dengan adanya pertanyaan ini nantinya diharapkan mampu memperjelas tulisan mengenai Pendudukan Vietnam di Kamboja, adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana situasi Kamboja menjelang terjadinya pendudukan Vietnam di Kamboja ?
2. Bagaimana proses jalannya konflik antara Vietnam dan Kamboja ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan terutama oleh ASEAN ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mendeskripsi dan analisis tentang keadaan wilayah Kamboja menjelang terjadinya pendudukan oleh Vietnam di wilayah Kamboja.
2. Untuk mendeskripsi dan menganalisis tentang jalannya konflik sampai akhirnya Vietnam melakukan pendudukan di Kamboja.
3. Untuk mendeskripsi dan menganalisis tentang upaya-upaya yang dilakukan dunia internasional terutama ASEAN untuk mencapai kemerdekaan.

D. Manfaat Penulisan

Dengan adanya penulisan ini diharapkan hasilnya akan bermanfaat.

1. Manfaat secara praktis, bagi dunia pendidikan dengan penulisan ini diharapkan akan menambah pengetahuan tentang sejarah Kamboja pada saat diduduki oleh Vietnam .

2. Manfaat teoritis, dengan adanya penulisan ini diharapkan akan menambah khasanah sumber bacaan untuk umum, sehingga dapat mengetahui tentang sejarah pendudukan Vietnam di Kamboja.

E. Tinjauan Pustaka

Skripsi yang berjudul Pendudukan Vietnam di Kamboja ini merupakan suatu studi pustaka, maka data-data tentang fakta-fakta yang ada diperoleh dari beberapa buku/pustaka. Untuk membahas masalah yang dikemukakan di atas maka dipakai beberapa sumber untuk menjawab masalah tersebut. Sumber-sumber yang digunakan dapat dibagi dalam sumber primer dan sumber sekunder. Yang dimaksud dengan sumber primer adalah sumber yang dihasilkan oleh orang-orang/lembaga sejaman atau hasil rekaman sejaman dengan peristiwanya, dengan kata lain sumber tersebut tidak berasal dari sumber lain (saksi pandangan mata baik sebagai pelaku maupun sebagai pengamat), sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang dihasilkan oleh orang/lembaga yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan (sumber dari tangan kedua).⁸

Adapun sumber yang digunakan dalam penulisan ini adalah sumber sekunder, sumber yang digunakan sbagai acuan adalah data kepustakaan. Untuk mencari data yang akurat perlu untuk dibedakan antara sumber utama atau sumber pokok dan sumber pembanding atau referensi tambahan. Dan sumber pokok yang dijadikan acuan dalam penulisan ini adalah *History of Chambodia*, David Chandler, buku ini berisi tentang sejarah Kamboja dari jaman kerajaan sampai

⁸ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta : UI, 1975), hal. 34

awal pendudukan Vietnam di Kamboja, terbitan berkala, *Beberapa Segi Konflik Vietnam-Kamboja*, AR. Sutopo, isi dari tulisan ini yaitu mengenai pendudukan Vietnam di Kamboja dan juga keterlibatan negara RRC dan Uni Soviet dalam masalah Kamboja, beberapa surat kabar seperti Kompas, Sinar Harapan, dan sebagainya, karena buku-buku yang dipakai sebagai acuan dalam masalah ini belum banyak, maka penulis banyak menggunakan sumber dari surat kabar. Sedangkan sumber yang dijadikan pembanding dalam penulisan ini adalah buku yang berjudul *Dunia di Tengah Kemelut*, Harry Kawilarang, buku ini berisi tentang beberapa peristiwa politik di dunia internasional termasuk tentang pendudukan Vietnam di Kamboja, *Analisa* tulisan Kirdi Dipoyudo, dalam tulisan ini berisi mengenai akar-akar permasalahan dari konflik Kamboja – Vietnam dan beberapa buku lain serta surat kabar.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian sejarah adalah suatu proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.⁹ Hal ini sangat bermanfaat bagi sejarawan untuk merekonstruksi peristiwa masa lampau secara imajinatif berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh melalui proses historiografi. Metode penelitian sejarah mempunyai empat tahap yaitu heuristik, kritis sumber, interpretasi, dan historiografi.

Heuristik merupakan suatu proses pengumpulan data untuk kepentingan subjek yang diteliti. Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari

⁹ *Ibid*, hal. 32

literatur yang ada di perpustakaan baik diperoleh berupa buku-buku pustaka, majalah, surat kabar, atau publikasi lainnya. Sedangkan metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode sejarah yang deskripsi analitis yaitu menguraikan peristiwa-peristiwa sejarah berdasarkan kausalitas, faktor-faktor kondisional, determinasi, ruang dan waktu.

Tahap berikutnya adalah kritik sumber (verifikasi data), yang bertujuan untuk mengetahui kredibilitas dan otensitas sumber. Kritik sumber dalam penelitian sejarah merupakan sesuatu yang harus dilakukan, guna menghindari adanya kepalsuan dan keberpihakan suatu sumber. Kritik sumber itu sendiri ada dua macam yaitu kritik intern (kredibilitas) yang merupakan perbandingan antara sumber dan kritik ekstern (otensitas) untuk mengetahui keaslian dari sumber yang diambil.

Setelah data diseleksi dan diuji kebenaran kemudian tahap selanjutnya adalah diinterpretasikan atau dianalisis yaitu tahap penguraian informasi, fakta, dan relasi satu dengan yang lain tanpa meninggalkan ketentuan dalam penulisan sejarah. Dan tahap terakhir adakah historiografi yaitu suatu proses penulisan kembali runtutan peristiwa-peristiwa masa lampau berdasarkan data-data yang sudah diperoleh dan diuji kebenarannya, dan proses ini dikatakan berhasil apabila mampu menghasilkan sintesis dari tesis dan analitis yang telah diolah.

G. Landasan Teori

Sebelum masuk pada pembahasan permasalahan tersebut, perlu dijelaskan beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konsep yang

berhubungan dengan judul yaitu *pendudukan* yang artinya tentara asing yang menduduki suatu daerah atau dapat dikatakan suatu perbuatan menduduki suatu daerah tertentu, sedangkan *di* sebagai keterangan tempat.¹⁰ Setiap unit sejarah mempunyai lingkup temporal dan spasial (ruang dan waktu),¹¹ dimensi ruang yang diajukan dalam penulisan ini adalah Kamboja, sedang dimensi waktu pada penulisan ini adalah 1979-1989. Tahun 1979 digunakan sebagai awal penelitian ini karena tahun ini merupakan awal pendudukan Vietnam di Kamboja, setelah terjadinya serangan besar-besaran pada akhir tahun 1978. Tetapi sebelumnya juga akan dibahas sedikit tentang pemerintahan Pol Pot karena bagaimanapun juga peristiwa pendudukan Vietnam di Kamboja terjadi pada masa pemerintahan Pol Pot, kemudian sampai terjadinya perang di perbatasan antara pasukan Vietnam dengan Kamboja sampai akhirnya Vietnam memutuskan untuk melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Kamboja dengan mendukung pemberontak yang menentang pemerintahan Pol Pot dan akhirnya Vietnam menduduki wilayah Kamboja dengan membentuk pemerintahan “boneka” pimpinan Heng Samrin. Setelah melalui beberapa pertempuran dengan kelompok perlawanan anti Vietnam, dan juga atas desakan negara-negara ASEAN maupun negara-negara lainnya akhirnya Vietnam menarik pasukannya dari wilayah Kamboja sampai akhir tahun 1989.

Kemudian beberapa kata yang terdapat dalam penulisan ini yaitu diantaranya *konflik* yang berarti persaingan antara kelompok individu yang satu dengan kelompok individu yang lain yang disebabkan oleh kepentingan yang

¹⁰ WJS. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1976), hal. 260

¹¹ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta : PT. Gramedia, 1992), hal. 72

sama, *perang* yaitu suatu bentuk permusuhan antara dua negara/lebih yang disebabkan oleh kepentingan yang berbeda dan melibatkan kontak senjata secara terbuka.¹² *Konsesi* yaitu ijin (untuk membuka tambang dan sebagainya), *revolusioner* yang berarti penganut paham politik yang menghendaki perubahan ketatanegaraan dengan sekaligus, dan *konsolidasi* yang merupakan perbuatan memperkuat suatu hubungan/persatuan.¹³ *Resolusi* yaitu putusan/keputusan pendapat yang berupa permintaan/tuntutan yang ditetapkan oleh sidang.¹⁴ *Penjajahan* yaitu penguasaan atas suatu negara oleh bangsa lain.¹⁵

Penjelasan beberapa konsep ini penting sebab merupakan landasan berpikir dan sebagai pembatasan masalah, di samping itu supaya tidak terjadi salah penafsiran dan multi interpretasi. Dengan demikian diharapkan ada kesamaan persepsi mengenai konsep-konsep yang dikemukakan oleh penulis.

H. Sistematika

Sistematika yang digunakan dalam skripsi sehingga menjadi kajian sejarah adalah pembahasan suatu permasalahan dan analisis yang diteliti dalam pencarian konsep sebagai alat untuk mempermudah analisis dan sintesis historis.¹⁶

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hal. 668

¹³ WJS. Poerwardaminto, *op.cit.*, hal. 520

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op.cit.*, hal. 745

¹⁵ J.S. Badudu, Sutan Zain, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994), hal. 547

¹⁶ Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hal. 18

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, landasan teori dan sistematika penulisan.

BAB II : SITUASI KAMBOJA MENJELANG PENDUDUKAN VIETNAM

Di dalam bab yang kedua ini dibahas mengenai sekilas tentang wilayah Kamboja yaitu kondisi geografis, dan juga kehidupan masyarakat Kamboja secara umum. Selain itu juga dibahas tentang situasi pemerintahan di Kamboja terutama pada masa pemerintahan Pol Pot, kemudian juga mengenai munculnya kaum pemberontak yang didukung oleh Vietnam.

BAB III : PROSES JALANNYA PENDUDUKAN VIETNAM DI KAMBOJA

Bab ini berisi tentang masa-masa pertempuran antara pemerintahan Kamboja melawan tentara Vietnam sampai berkuasanya pemerintahan boneka Vietnam di Kamboja di bawah pimpinan Heng Samrin. Lalu reaksi dari orang-orang Kamboja terutama para pejuang-pejuang Kamboja terhadap pendudukan Vietnam. Selain itu juga peranan hubungan antara negara-negara besar komunis yaitu RRC dan Uni Soviet terhadap masalah di Kamboja, serta posisi Thailand dalam konflik ini.

BAB IV. UPAYA PENYELESAIAN MASALAH KAMBOJA TERUTAMA DARI ASEAN

Di dalam pembahasan bab keempat ini dikemukakan mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN, salah satunya ialah usulan tentang koalisi longgar kepada para pemimpin

perlawanan anti Vietnam. Sampai akhirnya terbentuk Pemerintahan Koalisi, dan anggota-anggota yang duduk dalam pemerintahan ini adalah orang-orang dari ketiga kelompok utama perlawanan anti Vietnam. Adapun upaya penyelesaian yang dilakukan ASEAN yaitu dengan mengadakan pertemuan informal di Jakarta.

BAB V : KESIMPULAN

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan.



BAB II

SITUASI KAMBOJA MENJELANG PENDUDUKAN VIETNAM

A. Sekilas tentang Kamboja

1. Letak Geografis

Wilayah Kamboja terletak di bagian barat daya Semenanjung Indocina, berbatasan dengan negara Thailand di sebelah barat dan utara, Laos di sebelah utara, dan Vietnam di sebelah timur dan selatan serta Teluk Siam di bagian barat daya.¹⁷ Daerah ini memiliki petak seluas 178.000 kilometer persegi di kawasan Indocina belahan selatan, dan petak ini sebenarnya merupakan gudang beras.¹⁸ Hal ini tidak mengherankan karena lahan di wilayah Kamboja merupakan lahan yang subur karena wilayah ini bertempat bermuaranya sungai Mekong dan danau Tonle, dan pengairan yang baik sangat ideal untuk area persawahan. Danau Tonle ini dialiri dari sungai Tonle Sap yaitu anak sungai Mekong, dan juga terdapat dataran yaitu dataran Tonle Sap yang bagian pinggirnya terbentuk oleh sejumlah pegunungan.¹⁹

Di wilayah Kamboja termasuk daerah tropis yang mempunyai curah hujan cukup tinggi. Tetapi curah hujan di wilayah Kamboja termasuk tidak merata, hal ini tercermin dalam variasi tumbuhan-tumbuhan alam, di daerah yang curah hujannya tinggi terdapat beberapa hutan tropis, sementara di

¹⁷ Redaksi Ensiklopedi Indonesia. *Ensiklopedi Indonesia Seri Geografi*. (Jakarta : PT. Intermedia, 1990), hal. 127

¹⁸ Harry Kawilarang. *Dunia di Tengah Kemelut*. (Jakarta : UI Press, 1975), hal. 136

¹⁹ Redaksi Ensiklopedi Indonesia, *op.cit.*, hal. 128

daerah yang curah hujannya rendah hanya terdapat sabana yang ditumbuhi pohon-pohon kecil.

2. Ekonomi

Lahan di wilayah Kamboja termasuk lahan yang produktif bagi penanaman padi di kawasan Asia pada tahun-tahun sebelum perang pecah, dan padi merupakan hasil pertanian yang terpenting. Padi dibudidayakan terutama di daerah sepanjang sungai Mekong dan juga disekitar danau Tonle Sap, tapi setelah negeri ini dilanda perang para petani sulit mendapatkan bibit unggul, obat hama padi, keadaan ini menjadi bertambah parah dengan terjadinya kemarau yang berkepanjangan.

Di samping padi sebagai hasil pertanian yang utama, negeri ini juga mempunyai hasil perkebunan seperti karet, kopi, dan tumbuhan tropis lainnya. Bahkan Kamboja pernah dikenal sebagai produsen karet, ketika masih menjadi daerah kolonial Perancis. Selain agraris, negara ini juga memiliki harta karun pertambangan seperti emas, mangan, dan minyak tetapi harta tersimpan ini belum digarap secara intensif. Meskipun begitu Kamboja pernah mempunyai komoditi ekspor yaitu padi dan karet, bukan hanya itu saja, sektor industri juga sudah ada walaupun masih dalam taraf sederhana yang meliputi penggilingan padi, pengolahan kayu, produk ikan, dan penggilingan gula, tekstil, dan juga goni.²⁰

Akibat perang yang berkepanjangan (sejak tahun 1970) telah menghancurkan sektor perindustrian di negeri Kamboja. Hal ini ditandai

²⁰ Richard Buttwell. *Negara dan Bangsa Jilid III*. (Jakarta : Widyadasa, 1989), hal. 194

dengan kurangnya tenaga kerja yang terampil, bahan mentah industri dan juga suku cadang yang sulit didapat.²¹ Sementara itu produksi pabrik pemerintah jauh di bawah kapasitas yang sebenarnya, situasi ini juga mempengaruhi para investor asing karena mereka merasa negeri Kamboja tidak aman, jadi mereka juga enggan menanamkan modalnya di Kamboja.

3. Penduduk

Hampir 80% penduduk Kamboja adalah keturunan bangsa Khmer, 4,6% adalah suku Cina dan orang Vietnam, yang berdasarkan tradisi yang sudah tertanam dalam perasaan bangsa Kamboja bahwa mereka tidak disukai, penduduk lain terutama dari beberapa kelompok etnis Asia lain termasuk Melayu Cham, yaitu orang Khmer Islam, suku-suku bangsa primitif yaitu orang Khmer Loeu (orang gunung).²²

Pembauran dengan orang Cina telah berlangsung secara luas, sedang kawin campur dengan orang Vietnam jauh lebih sedikit akibat ketidakpercayaan orang-orang Kamboja terhadap orang-orang Vietnam yang telah berurat akar dalam perasaan orang Kamboja. Sedangkan pembauran dengan orang Melayu Cham mengalami hambatan, ini terjadi karena perbedaan kepercayaan, bila orang Melayu Cham beragama Islam, sedang orang Khmer mayoritas beragama Budha.

Perasaan tidak percaya dan juga tidak senang dengan orang-orang Vietnam tampak saat terjadi pembersihan penduduk Vietnam yang dilakukan

²¹ Redaksi Ensiklopedi Indonesia, *op.cit.*, hal. 129

²² *Ibid*, hal. 128

awal tahun 1970-an.²³ Sementara itu pendidikan rakyat Kamboja termasuk masih rendah, ini dapat dilihat dengan jumlah yang hanya 4,8% penduduk yang melek huruf, hal ini terjadi karena mereka hanya mengandalkan biara-biara para biksu sebagai tempat belajar. Keadaan ini justru akan semakin parah setelah berkuasanya rezim komunis di Kamboja, karena pada saat ini banyak sekolah-sekolah yang ada ditutup, begitu juga dengan kuil/biara-biara banyak yang dirusak.

B. Situasi Kamboja menjelang Pendudukan Vietnam

1. Masa Pemerintahan Pol Pot

Setelah Lon Nol berhasil digulingkan oleh kelompok Khmer Merah, negara Kamboja akhirnya jatuh ke tangan komunis yang dipimpin oleh tiga serangkai yaitu Saloth Sar atau yang lebih dikenal dengan nama Pol Pot, Ieng Sary, dan Khieu Samphan. Pol Pot mengakui bahwa sebenarnya Partai Komunis Kamboja sudah berkembang selama tujuh belas tahun dan berjuang sebagai gerakan bawah tanah yang bertujuan untuk merebut kekuasaan.²⁴ Dalam upaya merebut kekuasaan dari pemerintahan Lon Nol ini Pol Pot dan Ieng Sary mendapatkan dukungan dari RRC, karena Pol Pot menyatakan anti dengan federasi negara-negara Indocina yang akan diwujudkan oleh Vietnam. Meskipun sebenarnya hal tentang pembentukan federasi ini tidak diungkapkan

²³ Richard Butwell, *op.cit.*, hal. 92

²⁴ *Kompas*, 17 April 1978

oleh Vietnam secara terbuka, usaha ini juga mendapat dukungan dari Thailand yang khawatir akan adanya arus penetrasi Vietnam ke wilayah Thailand.²⁵

Setelah berhasil menguasai wilayah Kamboja, kemudian mereka membentuk suatu pemerintahan yang disebut Demokratik Kamboja, lalu dibentuk susunan kabinet yang nantinya akan menjalankan pemerintahan yang baru ini, mereka meliputi :

1. Khieu Samphan sebagai Presiden Demokratik Kamboja.
2. Pol Pot sebagai Perdana Menteri.
3. Ieng Sary sebagai Wakil Perdana Menteri.
4. Son Sen sebagai Menteri Pertahanan.
5. Vorn Veth yang menangani masalah Ekonomi.
6. Ieng Thirith (isteri Ieng Sary) menangani masalah Sosial.
7. Yun Yet (isteri Son Sen) sebagai Kepala Kebudayaan.
8. Pol Pennary (istri Pol Pot) sebagai Ketua Asosiasi Wanita Demokratik Kamboja.²⁶

Dari susunan administrasi pusat dan kepresidenan serta menteri-menteri kunci yang duduk dalam pemerintahan adalah merupakan teman-teman dekat bahkan keluarga.

Kamboja yang kini telah dikuasai oleh Pol Pot merupakan satu-satunya negara yang pemimpin-pemimpinnya secara setia dan tekun menyokong ajaran Mao Tse Tung dan juga fikiran-fikirannya, maka tindakan yang diambilpun berdasarkan pada tindakan yang telah diterapkan oleh

²⁵ Harry Kawilarang, *op.cit.*, hal. 139

²⁶ Craig Etcheson. *The Rise and Demise of Democratic Kamphuchea*. (Colorado : Westview Press, 1984), hal. 173

Mao.²⁷ Seperti diterapkannya pembunuhan massal sebagai usaha untuk mengurangi jumlah penduduk Kamboja sampai mencapai dua juta jiwa, sedangkan berdasarkan sensus tahun 1975 jumlah penduduk Kamboja mencapai tujuh juta jiwa.²⁸ Mereka tidak merahasiakan rencana mereka, bahkan diumumkan dalam suatu pertemuan akbar dengan sejumlah rakyat Kamboja yang diadakan di Battambang pada bulan Februari 1977, dan mereka mengatakan bahwa “2.500.000 musuh telah dibinasakan di dalam negeri”.²⁹

Tindakan yang diambil oleh Pol Pot dan Ieng Sary selanjutnya ialah menghapuskan beredarnya uang, karena menurut mereka bahwa uang itu adalah sumber segala kejahatan, pemimpin-pemimpin Kamboja membuang mata uang segera setelah mereka mengambil kekuasaan di negeri Kamboja. Walaupun bangsa Kamboja tidak mendapatkan uang untuk pekerjaan mereka, bukan berarti bahwa mereka menerima makanan dan pakaian sebagai imbalan dari pekerjaan yang telah mereka lakukan. Dengan kata lain pemerintahan komunis ini ingin melakukan langkah yang mengguncang dunia yaitu usaha untuk mencapai masyarakat sosialis “murni” seperti ajaran Mao, yang ditempuh secara radikal yaitu dengan memporak porandakan segala tata nilai lama, salah satunya dengan merombak tata sosial ekonomi yaitu menghilangkan mata uang dan juga meniadakan pasar.³⁰

Di samping tindakan yang telah dilakukan tersebut, Pemerintahan Demokratik Kamboja kemudian mencoba menyamaratakan sepenuhnya kaum

²⁷ *Merdeka*, 14 Mei 1979

²⁸ Di Cina dapat mengatasi berbagai masalah pelik dengan melenyapkan orang-orang yang berusia 50 tahun

²⁹ *Merdeka*, 14 Mei 1979

³⁰ *Tempo* (tajuk), 13 Januari 1979

tani. Anak-anak diambil dari keluarga, laki-laki dan perempuan berpisah, dapat dikatakan bahwa pemerintahan baru ini menghapuskan keluarga. Maka tidak mengherankan bila pada masa pemerintahan Pol Pot, jutaan orang Kamboja tidak mempunyai tempat tinggal, dan ratusan bahkan ribuan rakyat Kamboja mati kelaparan karena telah dibunuh oleh pendukung rezim komunis ini.³¹ Hal ini berbeda dengan keadaan sebelumnya, dimana struktur kehidupan sosial masyarakat Khmer dari tingkat keluarga sampai nasional yang tadinya sehari-hari dipengaruhi cara hidup Thailand dan Laos terjadi perubahan drastis setelah berkuasanya Pemerintahan Demokratik Kamboja yaitu keluarga menjadi terpisah.

Hanyalah desa sajalah yang tidak terbatas, padang luas bagi kegiatan-kegiatan revolusioner, sedang kota sajalah yang menjadi pangkalan revolusi, dimana kaum revolusioner berbaris menuju kepada kemenangan.³² Demikian penafsiran cita-cita dari Mao tentang pendapatnya terhadap kehidupan kota dan desa, menurutnya orang ingin hidup di kota-kota besar untuk kesenangan daripada untuk bekerja. Berdasarkan pada pemikiran yang sama, akhirnya para pejabat Kamboja mengirim hampir setiap penduduk dari kota ke desa-desa, segera setelah mereka menduduki kota-kota. Jutaan rakyat yang tinggal di kota dipaksa di bawah tekanan ujung bayonet untuk pindah ke desa-desa guna menjalankan pekerjaan rodi.³³ Mereka yang dipaksa bekerja ini dimukimkan di desa-desa dan komune pertanian di seluruh Kamboja dan mereka diperintah untuk bekerja dengan sekeras-kerasnya selama 16-17 jam,

³¹ David Chandler. *A History of Cambodia*. (Colorado : Westview Press, 1983), hal. 191

³² *Merdeka*, 15 Mei 1979

³³ *Merdeka*, 20 Februari 1981

masih banyak lagi lainnya yang diambil dari rumahnya di tengah-tengah malam oleh pasukan Khmer Merah untuk ditembak atau dipentung sampai mati. Bukan hanya itu saja yang diterapkan oleh para pemimpin Kamboja ini masih banyak lagi rakyat yang menjadi korban kekejaman mereka, ribuan orang mendapat siksaan bahkan sampai mati di pusat interogasi yaitu di Toul Sleng, yang juga merupakan kamp hukuman mati di daerah pinggiran Pnom Penh.³⁴ Dengan adanya kerja paksa ini menimbulkan banyak sekali korban, dan berita ini akhirnya sampai juga ke dunia luar dan banyak mendapatkan kecaman dari banyak pihak negara termasuk negara komunis. Pemerintah Kamboja dituduh secara sengaja melakukan pembunuhan massal pada rakyatnya, dan pemerintah ini mulai kehilangan simpati dunia.³⁵

Dalam masyarakat Kamboja sebelumnya mayoritas beragama Budha, sehingga banyak dijumpai biara-biara dan juga biksu, pemandangan ini tampak pada saat sebelum Kamboja jatuh ke tangan rezim komunis. Setelah Kamboja dikuasai oleh kelompok Khmer Merah, segala agama dan kebiasaan tradisional turun temurun diharamkan.³⁶ Para pemimpin Kamboja yang baru ini melarang agama hidup di wilayahnya, biksu Budha dicabut ke-biksuannya, patung-patung Budha dibinasakan, pegoda-pagoda yang merupakan tempat beribadat juga dihancurkan bahkan tempat yang dulunya dianggap suci ini setelah berkuasanya komunis digunakan sebagai tempat (lumbung) padi. Dengan kata lain segala penyembahan dan semua upacara agama dilarang

³⁴ David Chandler, *op.cit.*, hal. 192

³⁵ *Tempo* (tajuk), 13 Januari 1979

³⁶ *Ibid*

sama sekali, kebanyakan para pemimpin penyembahan (pedada) ini dihukum mati.

Untuk menakutkan penduduk Kamboja bahwa mereka sebenarnya hidup “bahagia”, maka para pejabat Kamboja yang baru ini dengan segala daya upaya mencoba menerangkan kepada rakyat Kamboja bahwa dibandingkan dengan Kamboja pada masa berada dalam kekuasaan imperialis Amerika, dan sejumlah pengkhianat, kaum feodal, kaum modal, dan pemereras rakyat yang lain, maka mereka sekarang diberikan makan yang lebih baik, diberi sandang dan merasa aman.³⁷ Padahal jika dilihat pada kenyataannya, maka kehidupan rakyat pada masa Pemerintahan Demokratik Kamboja justru bertambah buruk. Sementara itu Pol Pot dan Ieng Sary mulai menjalankan politik yang sama dengan ajaran Mao yaitu bahwa satu generasi baru hanya mengenal fikiran dan cita-citanya saja dan bukan yang dimiliki orang lain, berdasarkan pemikiran tersebut maka mereka bermaksud menghancurkan semua generasi tua dan membangun suatu generasi muda Kamboja yang seyogyanya menerima rezimnya sebagai yang terbaik, maka pemandangan yang tampak adalah hanya terdapat serdadu-serdadu muda, para pekerja dan para petani yang juga masih muda. Pada Pemerintahan Demokratik Kamboja ini pendidikan terutama untuk pendidikan formal termasuk buruk, karena sekolah-sekolah ditutup, mereka hanya diajarkan untuk bekerja.

Menurut Pol Pot dan Ieng sary bahwa orang-orang di lingkungan Mao memusnahkan esensi atau sari fikiran Mao yang militan, karena melenyapkan

³⁷ *Merdeka*, 16 Mei 1979

dalam kekaburan pendapatnya tentang perang, sedang pandangan Mao tentang perang ialah bahwa “perang adalah angka kita yang terbaik, orang tidak perlu takut pada perang, jika ada perang akan ada yang mati, tetapi orang tidak perlu takut mati, karena perang menenangkan manusia, perang menyumbang kepada kesadaran dan persatuan mereka”.³⁸ Hal ini memang diterapkan oleh Pemerintahan Demokratik Kamboja yaitu dengan mengungkit masalah lama yaitu masalah perbatasan dengan Vietnam, dengan alasan itu maka pada tahun 1977 melakukan pembersihan terhadap orang-orang Vietnam yang tinggal di Kamboja.

2. Front Persatuan Nasional Penyelamat Kamboja

Peralihan sistem kemasyarakatan dari yang lama menuju ke komunisme yang sedang dilakukan oleh penguasa-penguasa Kamboja tidak berjalan dengan sukarela dan lancar, bahkan cenderung dilaksanakan secara kejam. Maka tidak mengherankan bila kemudian muncul kelompok-kelompok perlawanan yang membangkang terhadap penguasa baru di Kamboja, mereka umumnya bertempat di daerah-daerah perbatasan baik itu perbatasan Kamboja – Vietnam maupun perbatasan Kamboja – Thailand.³⁹

Pemerintahan Pol Pot bukan hanya melakukan tindakan-tindakan kejam terhadap rakyat Kamboja, tetapi ia ingin juga membangkitkan kembali sentimen ratusan tahun yang lalu terhadap negara tetangganya yaitu Vietnam dengan mempermasalahkan tentang pelanggaran perbatasan.⁴⁰ Maka setelah

³⁸ *Kompas*, 15 Mei 1979

³⁹ AR. Sutopo, *op.cit.*, hal. 86

⁴⁰ Berdasarkan buku hitam milik Pol Pot, Vietnam telah melakukan pelanggaran perbatasan sejak 1471. (lihat) *Tempo*, 20 Januari 1979

rezim Pol Pot berkuasa di Kamboja perpecahan antara Kamboja dengan Vietnam tidak terhindarkan lagi. Kamboja mulai melakukan serangan-serangan, juga pelanggaran wilayah dan pembunuhan di kalangan penduduk sipil di pedesaan. Bahkan diperkirakan bahwa konflik perbatasan antara negara Vietnam dengan Kamboja telah meningkat ke tahap perang, dimana pihak Kamboja terus melakukan serangan terhadap Vietnam, ini terlihat dengan dikirimnya beberapa pasukan Kamboja untuk menduduki wilayah-wilayah Vietnam. Sedangkan menurut keterangan dari Wakil Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Duy Trinh mengatakan bahwa tawaran gencatan senjata yang diajukan oleh Vietnam kepada Kamboja justru digunakan sebagai kesempatan invasi lebih jauh ke dalam wilayah Vietnam.⁴¹

Sementara itu Hanoi masih tetap mengusahakan untuk membangun kembali hubungan yang baik dengan Kamboja, mereka ingin kembali mengukuhkan semacam “hubungan khusus” dengan Kamboja. Maksud Vietnam ini ditandai dengan dikembalikannya kepulauan Wai kepada Kamboja yang semula telah dirampas Vietnam, hal ini dilakukan sebagai respon terhadap pendudukan Pulau Phu Quoc oleh pasukan Kamboja.⁴² Bahkan pada pertengahan tahun 1976, Vietnam mengirim suatu tim perundingan ke Phnom Penh guna mengusahakan persetujuan mengenai perbatasan tersebut, tetapi ternyata usaha Vietnam ini mengalami kegagalan. Kemudian pada tanggal 31 Desember 1976 Vietnam mengusulkan langkah-langkah untuk menghentikan konflik tapal batas antara Vietnam dengan

⁴¹ *Sinar Harapan*, 17 April 1978

⁴² Race, Jeffrey, dan W. Turley. “Vietnam, Cina dan Keamanan Asia Tenggara”. *Prisma* tahun IX No. 4, April 1980



tetangganya Kamboja, tetapi di lain pihak, Kamboja justru memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Vietnam.⁴³

Memang tampaknya kelanjutan dari hubungan antara Kamboja dengan Vietnam ini cukup mengkhawatirkan terutama bagi negara-negara tetangga yang lain karena tampaknya Hanoi cukup serius juga menanggapi segala tindakan yang telah dilakukan oleh Kamboja. Mula-mula Hanoi ingin memecahkan permasalahan ini dengan jalan kekerasan, tetapi hal ini akan membawa resiko internasional yang berat maka ditempuhlah cara yang dianggap mudah yaitu dengan menyokong potensi-potensi pemberontakan yang mulai bermunculan di wilayah Kamboja. Usaha ini ternyata tidak terlalu sulit, karena dikalangan para pemimpin Kamboja sendiri saat itu sedang terjadi persaingan dan perpecahan. Bahkan sering juga terjadi bentrokan-bentrokan di antara mereka sendiri, perpecahan itu sendiri kiranya berhubungan dengan kekuasaan atas wilayah Kamboja. Di lain pihak, orang-orang Vietnam telah mencoba untuk memperparah perpecahan-perpecahan intern di antara para pemimpin Khmer Merah dan mereka jelas-jelas mensponsori usaha kudeta, apalagi setelah usulnya di bulan Februari 1978 ditolak,⁴⁴ mulailah mereka membantu para pemberontak.

Dalam mendukung para pemberontak terhadap Khmer Merah, Vietnam tidak tanggung-tanggung, mereka mengirim meriam, tank, dan juga senjata berat. Selain itu Vietnam juga menggunakan kendaraan lapis baja,

⁴³ David Chandler, *op.cit.*, hal. 192, (lihat juga) Kirdi Dipoyudo, *op.cit.*, hal. 659

⁴⁴ Pada tanggal 5 Februari 1978, Vietnam mengusulkan ditetapkannya suatu wilayah yang dikosongkan dari kegiatan militer disepanjang perbatasan dan digunakannya pengawasan internasional. *Prisma* tahun IX No. 4 April 1980

arteleri, dan pesawat tempur yang terkoordinir dengan rapi.⁴⁵ Dengan menilik dari dukungan persenjataan yang lengkap, maka diperkirakan bahwa pertempuran sengit tidak dapat dielakkan lagi. Dalam memberi dukungan kepada para pemberontak ini, Vietnam bukan saja memberikan bantuan persenjataan, tetapi juga membentuk suatu front sebagai wadah perlawanan terhadap pemerintahan Pol Pot. Oleh karena itu pada tanggal 3 Desember 1978 diumumkan suatu front dengan nama Front Persatuan Nasional untuk Keselamatan Kamboja (KNUFS), front ini sepenuhnya mendapatkan dukungan dari Vietnam. Dalam front ini dipilih Heng Samrin sebagai presidennya, Heng Samrin adalah salah satu anggota Komite Sentral dan ia juga memegang posisi Wakil Kepala Staf wilayah militer Kamboja Timur dalam Pemerintahan Demokratik Kamboja, selain itu ia juga merupakan simpatisan Vietnam, karena dulu ia mempunyai hubungan yang erat dengan Vietcong.⁴⁶ Front tersebut menyerukan kepada semua rakyat Kamboja agar bersatu untuk menggulingkan pemerintahan Pol Pot demi hidupnya “kebebasan dan demokrasi sejati”. Dan dalam deklarasi yang dikeluarkan oleh kongres pembentuk front tersebut disebutkan bahwa :

- a) Jika di Kamboja sudah berdiri pemerintahan baru, maka Dewan Perwakilan Rakyat yang dibentuk Pol Pot otomatis akan dibubarkan, untuk selanjutnya akan dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat yang baru setelah diselenggarakan pemilu nasional,

⁴⁵ *Tempo* (tajak), 13 Januari 1979

⁴⁶ *Sinar Harapan*, 14 Juni 1979

- b) Akan dibuat suatu perundang-undangan baru yang menjamin hak-hak rakyat bagi persamaan dan kemerdekaan serta demokrasi sejati yang sekaligus diterapkan untuk pengaturan sebuah negara demokrasi dan merdeka menuju sosialisme,
- c) Setiap warga negara Kamboja mempunyai hak bebas tinggal di lingkungan negara, bebas untuk memilih dan dipilih, bebas berbicara, berkumpul, dan semua hak dijamin bebas,
- d) Suku bangsa sekalipun yang terkecil mempunyai hak dan tugas yang sama seperti penduduk lainnya,
- e) Pemerintah yang baru nanti akan mengatur suatu politik ekonomi bebas yang ditujukan untuk kemajuan sosialisme, pembangunan dibidang ekonomi ini akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang didasarkan pembangunan pertanian dan industri.⁴⁷

⁴⁷ *Merdeka*, 26 Desember 1978

BAB III

PENDUDUKAN VIETNAM DI KAMBOJA

A. Jatuhnya Pemerintahan Pol Pot

Seperti pertikaian antara pemerintahan Kamboja dengan Vietnam akan semakin bertambah meruncing, apalagi pemerintahan Kamboja yang berkuasa saat itu yaitu Pemerintahan Demokratik Kamboja di bawah pimpinan Pol Pot sering mengungkit-ungkit masalah perbatasan. Bahkan sering terjadi bentrokan-bentrokan diantara kedua negara tersebut, memang ada kecenderungan bahwa konflik yang sering terjadi diantara negara-negara di dunia karena perselisihan teritorial yang seringkali berasal dari batas-batas yang dibuat seenaknya di jaman penjajahan atau karena persaingan suku tradisional dan periode prapenjajahan.⁴⁸

Pada masa pemerintahan Pol Pot banyak sekali rakyat yang telah menjadi korban dari kebijaksanaan yang berdasarkan pada ajaran Mao, bahkan pemerintahan ini berhasil bekerjasama dengan RRC, maka persenjataan mereka juga didukung oleh RRC. Dalam Pemerintahan Demokratik Kamboja ini juga terjadi perpecahan diantara orang-orang yang duduk di pemerintahan itu sendiri, seperti Heng Samrin yang kemudian mengundurkan diri dari pemerintahan selanjutnya melakukan suatu pemberontakan yang mendapatkan dukungan dari Vietnam bahkan sampai membentuk Front Persatuan Nasional Penyelamat Rakyat Kamboja. Mengingat perlakuan kejam dari pemerintahan Pol Pot ini terhadap rakyat Kamboja, maka tak mengherankan jika di Kamboja sendiri sering

⁴⁸ Christoph Bertram. *Konflik Dunia Ketiga dan Keamanan Dunia*. (Jakarta : Bina Aksara, 1988), hal. 38

terjadi pemberontakan-pemberontakan yang menentang kebijaksanaan Pemerintahan Demokratik Kamboja ini. Situasi ini tentu saja dimanfaatkan oleh Vietnam yang berusaha untuk menjatuhkan pemerintahan Pol Pot.

Pada bulan Januari 1978 pasukan Vietnam sudah memasuki wilayah Kamboja, mereka berkekuatan enam divisi dan hendak merebut ibukota, Phnom Penh dengan tujuan untuk membentuk suatu pemerintahan baru yang bersahabat. Dengan kata lain praktis daerah perbatasan Kamboja – Vietnam, di sebelah Kamboja dengan lebar berpuluh-puluh kilometer dan panjang 1200 kilometer di sebelah Timur sungai Mekong, sudah dikuasai pasukan Vietnam dan mereka tampaknya bergerak menuju Phnom Penh.⁴⁹

Sementara itu pasukan Kamboja berusaha menekan gerak maju pasukan Vietnam, pasukan Kamboja ini bergerak dengan diorganisir sesuai dengan yang digunakan tentara RRC. Mereka bergerak dalam kelompok-kelompok kecil yang berjumlah 24 orang, kemudian dalam sebuah serbuan nanti mereka saling bertemu. Di samping itu mereka juga dipersenjatai dengan senjata ringan yaitu senapan otomatis jenis AK – 47 buatan RRC yang cocok untuk pertempuran khusus di hutan secara jarak dekat, selain itu ada juga senjata mortir yang ditinggalkan oleh pasukan Amerika Serikat, senjata-senjata mesin berat buatan RRC.⁵⁰ Sebenarnya pasukan RRC ikut membantu dalam perlawanan dari pemerintahan Kamboja terhadap pasukan Vietnam ini, tetapi bukan di medan pertempuran melainkan sebagai perencana strategi pertempuran melawan Vietnam.

⁴⁹ *Kompas*, 4 Juni 1978

⁵⁰ *Kompas*, 4 Januari 1978

Dalam memberikan dukungan bagi pemerintahan Pol Pot, RRC sebetulnya merasa repot sendiri, di samping tentara dan perlengkapan militer Kamboja tidak bisa diandalkan, negara itu juga diperintah oleh Perdana Menteri yang lalim, yaitu Pol Pot. Dalam menjalankan pemerintahannya Pol Pot telah melakukan tindakan-tindakan yang kejam, sehingga banyak menimbulkan pemberontakan-pemberontakan di wilayah Kamboja sendiri, saat itu Kamboja mempunyai 60.000 tentara kemudian RRC mengirim penasehat militernya sekitar 20.000 orang sebagai perencana strategi bagi pasukan Kamboja dalam melakukan perlawanan terhadap pasukan Vietnam.⁵¹

Dalam sebuah serbuan ke Kamboja akhirnya Vietnam telah menguasai kota Mimot (sekitar 10 km di dalam wilayah Kamboja), kemudian Vietnam juga mengerahkan tentaranya sebanyak 70.000 ke propinsi Tay Ninh, yang terletak disepanjang perbatasan Kamboja.⁵² Dan pasukan Vietnam kali ini ditunjang oleh gempuran-gempuran udara, mereka bertempur melawan satuan Kamboja di Delta Mekong lebih jauh ke selatan. Sementara itu selama pertengahan Juni, Vietnam berhasil mengusir dua batalyon musuh yang berusaha memasuki wilayah Vietnam, bahkan Vietnam menuduh Kamboja telah mengadakan penetrasi di wilayah Vietnam, selain itu pihak Kamboja juga dituduh telah menyiksa beberapa penduduk perbatasan.⁵³

Semakin mendapatkan perlawanan jumlah pasukan Vietnam justru semakin meningkat, bahkan mereka mulai memasuki 50 - 60 km di wilayah

⁵¹ *Praba* (tajuk), Desember III/IV 1978, hal. 7

⁵² *Suara Karya*, 29 Juni 1978

⁵³ *Sinar Harapan*, 28 Juni 1977

Kamboja dengan kekuatan yang diperkirakan 80.000 tentara.⁵⁴ Gerakan pasukan Vietnam ini didukung dengan kekuatan senjata dan pesawat terbang buatan Amerika Serikat, pesawat ini diperoleh oleh Vietnam dari peninggalan pasukan Amerika setelah perang di Indocina, selain itu juga dibantu arteleri-arteleri berat, pasukan Vietnam juga mendapat dukungan dari Uni Soviet yaitu sebagai perencana strategi. Dilain pihak pasukan Kamboja juga melancarkan serangan secara besar-besaran terhadap empat daerah propinsi di Vietnam, dan pasukan Vietnam tentu saja tidak tinggal diam, mereka ganti melancarkan serangan balasan terhadap serbuan pasukan Kamboja.

Di sisi lain kaum pemberontak ternyata telah menduduki jalan-jalan di propinsi-propinsi seperti di Rattanakiri dan Stung Treng yang terletak di bagian timur laut Kamboja. Dengan adanya serangan ini tentu saja membuat keadaan di Kamboja semakin kacau karena serbuan dari pemberontak ini telah memutuskan jalur perbekalan di ibukota, selain itu mereka juga menyerang kota-kota Kratie dan Kompong Thom yang letaknya ada di bagian timur laut dan di tengah negeri itu.⁵⁵ Sementara itu tampak para serdadu pemerintahan di Kompong Chanang juga ikut melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Pol Pot, mereka memberontak dan merampas menara pengawas lapangan terbang kota itu, kemudian di Kamboja bagian barat, kaum pemberontak menembak perwira komandan mereka yang telah memperlakukan mereka secara kejam.

Tampaknya situasi di Kamboja yang semakin kacau dengan munculnya serangan-serangan dari kaum pemberontak ini dimanfaatkan oleh Vietnam,

⁵⁴ *Sinar Harapan*, 29 Juni 1978

⁵⁵ *Kompas*, 25 Oktober 1978

mereka menilai dengan keadaan seperti itu cukup baik untuk mengorganisasi perlawanan terhadap pemerintahan yang baru. Dan akhirnya pada tanggal 25 Desember 1978, pasukan Vietnam melakukan serangan besar-besaran ke wilayah Kamboja. Vietnam juga mengerahkan sekitar 100.000 pasukan reguler yang didukung oleh pesawat-pesawat pembom dan pemburu serta ratusan tank, sementara itu pemerintahan Pol Pot juga mengadakan perlawanan yaitu dengan mengerahkan 50.000 pendukungnya dan juga termasuk tentara-tentaranya,⁵⁶ selain itu pasukan Pol Pot ini mendapat dukungan dari RRC. Dalam penyerangannya kali ini Vietnam berhasil merebut ibukota, di samping itu Vietnam juga bermaksud menyelesaikan sengketa dengan kekerasan senjata dan dalam rangka pengamanan pada sisi barat daya Vietnam sehubungan sengketanya dengan RRC.

Dalam penyerangan dan pendudukannya Vietnam di sini juga mendapat dukungan dari Uni Soviet, masuknya tentara Uni Soviet di Vietnam karena persepsi Vietnam terhadap adanya ancaman RRC yaitu di perbatasan, selain itu juga adanya dukungan RRC terhadap pasukan Khmer Merah. Tak lama setelah berhasil memasuki wilayah Kamboja, pasukan-pasukan Vietnam berdiam diri untuk menilai situasi pada titik mana mereka bisa saja mundur kembali, andai kata reaksi dunia sangat negatif. Tetapi karena ternyata mereka tidak banyak menghadapi tantangan, maka mereka terus bergerak masuk hingga sampai ke perbatasan Kamboja – Thailand.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah bahwa sebuah pemerintahan komunis dijatuhkan oleh pemberontakan komunis yang didukung oleh suatu

⁵⁶ David Chandler, *op.cit*, hal. 193

negara komunis lain.⁵⁷ Setelah berhasil merebut kota Phnom Penh, Vietnam kemudian membentuk suatu pemerintahan baru di bawah pimpinan Heng Samrin. Pemerintahan ini dibentuk pada tanggal 7 Januari 1979, kemudian pemerintahan yang baru diumumkan oleh Dewan Revolusioner Rakyat dengan nama Republik Rakyat Kamboja (RPK), pemerintahan ini untuk menggantikan Pemerintahan Demokratik Kamboja.⁵⁸

Sementara itu orang-orang yang menduduki dalam pemerintahan baru ini sebagian ada juga bekas orang-orangnya Khmer Merah seperti Vorn Veth. Adapun beberapa orang yang duduk dalam pemerintahan Republik Rakyat Kamboja ini diantaranya :

1. Heng Samrin sebagai Presiden Republik Rakyat Kamboja
2. Chea Sim sebagai Wakil Presiden
3. Keo Chanda yang menangani masalah Informasi
4. Nu Beng sebagai Menteri Kesehatan
5. Keo Prasad mengurus masalah Luar negeri
6. Pen Sobhan sebagai Menteri Pertahanan.⁵⁹

Pemerintahan Heng Samrin berusaha untuk mendapatkan simpati dari rakyat Kamboja, karena tampaknya sejak pemerintahan Pol Pot berhasil digulungkan rakyat merasakan hidup normal lagi. Tetapi meskipun begitu bukan berarti tidak ada masalah karena dalam merebut pemerintahan Pol Pot, Heng Samrin dibantu oleh pihak Vietnam, mungkin untuk saat-saat tertentu kehadiran orang-orang Vietnam ini dapat ditolerir, tapi jika pendudukan yang dilakukan

⁵⁷ *Tempo* (tajuk), 20 Januari 1979, hal. 6

⁵⁸ *Asia Year Book*, 1980, hal. 205

⁵⁹ *Ibid*, hal. 206

Vietnam terus berkepanjangan, maka bukan mustahil bila rakyat Kamboja akan menentanginya. Hal ini terjadi mengingat hubungan antara orang-orang Kamboja yang mempunyai perasaan anti terhadap orang-orang Vietnam, dan perasaan ini sudah mendarah daging pada rakyat Kamboja.

Walaupun kota Phnom Penh telah berhasil dikuasai oleh Heng Samrin yang didukung oleh Vietnam, pasukan Pol Pot ternyata masih mampu memberikan perlawanan gigih dan dalam hal ini mereka mengharapkan dukungan rakyat yang anti Vietnam. Ternyata sisa-sisa pasukan Pol Pot masih mampu mengganggu pasukan-pasukan Vietnam yang menjadi setengah lumpuh akibat musim hujan. Sementara itu pemerintahan Heng Samrin tidak berhasil mendapatkan dukungan rakyat yang luas karena dianggap sebagai boneka Vietnam, yaitu musuh lama bangsa Kamboja, bahkan dunia internasional juga tidak mengakui pemerintahan Heng Samrin sebagai pemerintahan Kamboja yang sah.

B. Reaksi dari Rakyat Kamboja

1. Pembentukan Pemerintahan Koalisi

Reaksi terhadap pendudukan Vietnam di Kamboja ini terutama muncul dari para pejuang atau katakanlah orang-orang yang sebelum terjadinya pendudukan pernah menjadi penguasa di Kamboja. Mereka adalah Pol Pot yang masih menjadi pemimpin kelompok Khmer Merah, kelompok anti komunis yang bernama Front Pembebasan Nasionalis Rakyat Khmer (KPNLF) yang dipimpin oleh Son Sann, dan juga kelompok Sihanouk yang

menamakan kelompoknya Moulinaka. Tetapi diantara kelompok-kelompok ini mereka mengadakan perlawanan sendiri-sendiri, meskipun jika dilihat dari tujuan mereka ternyata sama yaitu menentang pemerintahan Heng Samrin dan mengusir pasukan Vietnam dari wilayah Kamboja.

Tiga kelompok utama perlawanan yang anti Vietnam yang meliputi kelompok Khmer Merah yang diwakili Khieu Samphan. Dan kelompok anti komunis KPNLF di bawah pimpinan Son Sann serta kelompok Sihanouk, mereka mengadakan suatu pertemuan segitiga di Singapura pada tahun 1981. Dalam pertemuan segitiga tersebut ternyata dihadiri oleh wakil dari ketiga kelompok perlawanan anti Vietnam tersebut, dan dalam pertemuan itu diperoleh hasil yang berupa empat pernyataan bersama. Adapun isi dari pernyataan yang telah disepakati dan kemudian ditandatangani oleh Sihanouk, Son Sann dan Khieu Samphan, yaitu :

- a) Menyatakan keinginan untuk membentuk suatu Pemerintahan Koalisi Republik Demokrasi Kamboja, dengan tujuan melanjutkan perjuangan dalam segala bentuk untuk membebaskan Kamboja dari agresor Vietnam,
- b) Membentuk suatu komite ad hoc untuk mempelajari prinsip dan bentuk yang memungkinkan terbentuknya pemerintah koalisi itu dan tujuan pembentukannya,
- c) Menyatakan dukungan penuh terhadap deklarasi dan resolusi konferensi internasional tentang Kamboja dan resolusi PBB lainnya yang berkenaan dengan masalah Kamboja,

d) Menyerukan kepada semua negara yang cinta damai di dunia untuk mendukung deklarasi dan resolusi-resolusi tersebut di atas.⁶⁰

Di samping itu di antara mereka juga sepakat untuk menghentikan permusuhan di antara kelompok-kelompok perlawanan anti Vietnam di Kamboja, dan berusaha untuk mencegah timbulnya pertentangan di antara mereka terutama yang disebabkan karena perbedaan satu dengan yang lain. Sebetulnya keinginan untuk membentuk suatu Pemerintahan Koalisi ini telah mendapat tanggapan positif, terutama dari ASEAN yang dianggap sebagai langkah awal dialog di antara kelompok-kelompok tersebut.

Ternyata pada kenyataannya Pemerintahan Koalisi yang diinginkan bersama ini belum dapat terwujud, hal ini mengingat di antara ketiga tokoh perlawanan anti Vietnam ini terjadi pertentangan terutama antara Son Sann dengan Khieu Samphan. Di antara mereka terdapat perbedaan yang prinsipil, menurut pernyataan Sihanouk yang dalam masalah ini sebagai penengah mengatakan bahwa Khieu Samphan meminta agar Son Sann memperlunak syarat-syarat yang diajukannya. Adapun syarat yang diajukan oleh Son Sann ialah bahwa dalam Pemerintahan Koalisi nanti, ia harus diangkat sebagai Perdana Menteri dan semua jabatan kunci dalam kabinet diberikan kepada pengikutnya dan para pemimpin Khmer Merah yang terlibat dalam pembunuhan kejam terhadap rakyat Kamboja diwaktu-waktu lalu, harus didepak keluar dari pemerintahan baru nanti, pokoknya Son San tidak mau

⁶⁰ *Suara Karya*, 15 September 1981

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

melihat kembalinya Khmer Merah berkuasa di Kamboja.⁶¹ Tetapi dilain pihak Son Sann juga ingin menggunakan kekuatan militernya untuk melanjutkan perang terhadap pendudukan Vietnam dan rezim Heng Samrin.

Sebenarnya jika dilihat kapasitas tentara yang dimiliki masing-masing kelompok, maka kelompok Khmer Merah yang mempunyai tentara yang kuat. Dan ini tentu saja cukup potensial untuk mengusir pasukan Vietnam di Kamboja, sampai saat itu rezim Khmer Merah yang dipimpin Khieu Samphan mempunyai pasukan sekitar 40.000 gerilwayan yang mendapatkan dukungan RRC.⁶² Selain itu di dunia internasional, kelompok Khmer Merah masih menduduki kursi Kamboja di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan tanggapan Khieu Samphan terhadap persyaratan Son Sann itu dianggap dapat membahayakan keinginan mereka untuk bersatu dan membentuk Pemerintahan Koalisi, mengingat posisi Khmer Merah yang jauh lebih besar bahkan lebih kuat dibanding KPNLF dan kelompok Sihanouk, maka akan sulit terbentuk suatu Pemerintahan Koalisi jika Khieu Samphan menolak tuntutan-tuntutan dari Son Sann.

Pembentukan Pemerintahan Koalisi ini tampaknya akan banyak menemui kesulitan, hal ini terlihat dari perselisihan dan adanya perbedaan pendapat yang prinsipil di antara ketiga kelompok tersebut. Selain itu pembentukan Pemerintahan Koalisi ini masih merupakan keinginan dan belum merupakan suatu keputusan, kemudian yang akan menjadi kesulitan juga untuk bersatunya kelompok-kelompok ini adalah tentang pembentukan

⁶¹ *Suara Karya*, 11 September 1980

⁶² *Ibid*

suatu komite ad hoc. Dalam pembentukan komite ini diperkirakan akan menjadi area persaingan dari kelompok-kelompok perlawanan ini untuk mempertahankan pendapat dan juga tokoh yang diajukan oleh masing-masing kelompok.

Meskipun tampak banyak kesulitan yang dihadapi dalam pembentukan Pemerintahan Koalisi ini, tetapi pertemuan segitiga antara ketiga kelompok perlawanan anti Vietnam tetap dilanjutkan, kali ini diselenggarakan di Bangkok. Ternyata hasil dari pertemuan di Bangkok ini juga tetap sama, selalu mengalami kegagalan, sebagian besar karena adanya ketidaksepakatan mengenai pembagian kekuasaan antara kelompok Khmer Merah dengan KPNLF.

Kemudian dilakukan lagi pertemuan segitiga di Bangkok lagi pada tanggal 14 November 1981, wakil-wakil dari tiga kelompok perlawanan sepakat “menyatakan keinginan” membentuk suatu koalisi. Meskipun di antara mereka masih mempunyai rasa saling mencurigai, adapun dasar dari persetujuan ini adalah negara-negara sahabat akan mensuplai bantuan lebih banyak khususnya bantuan militer jika ada persekutuan ketiga kelompok tersebut.⁶³

Melihat kenyataan bahwa tampaknya pembentukan Pemerintahan Koalisi yang anti Vietnam akan mengalami jalan buntu, mengingat kesulitan-kesulitan dan juga adanya perbedaan-perbedaan yang prinsipil di antara ketiga pimpinan kelompok tersebut, untuk itu ASEAN mengusulkan pembentukan

⁶³ *Kompas*, 15 November 1981

“Koalisi Longgar” yang diusulkan pada tanggal 10 Desember 1981, maksud dari koalisi ini adalah bahwa setiap kelompok akan mempertahankan identitasnya dan bebas untuk menyebarluaskan program dan falsafah politiknya bagi masa depan Kamboja.⁶⁴ Tetapi ternyata usulan ini ditolak oleh kelompok Khmer Merah, dalam pernyataannya Khmer Merah merasa bahwa mereka hanya akan menjadi satelit negara lain, maka mereka menolak usulan tersebut. Adapun rumusan-rumusan koalisi longgar itu mempunyai tujuan untuk menopang posisi pemerintah terguling itu dalam kancah internasional, sementara juga menambah fraksi-fraksi non komunis dalam koalisi tersebut.⁶⁵

Di samping itu Khmer Merah juga menyatakan bahwa mereka hanya bersedia bersatu dengan kedua kelompok lainnya yaitu kelompok Sihanouk dan KPNLF, jika kedua kelompok non komunis meleburkan diri ke dalam struktur Pemerintahan Demokratik Kamboja.⁶⁶ Sementara itu terhadap usulan ASEAN, Khieu Samphan dengan terang-terangan menyatakan menolak usulan itu. Khieu Samphan juga menyatakan bahwa hanya pembentukan “Pemerintahan Koalisi” lah yang dapat diterima. Dilain pihak ternyata Son Sann tidak bersedia bergabung dengan Demokratik Kambojanya Khmer Merah, ia merasa takut kekuasaannya dibatasi, juga takut terbawa-bawa mendapat reputasi buruk bersama rezim yang sudah dikenal sangat bengis itu, disisi lain Khmer Merah yang masih tetap diakui PBB menyatakan diri sebagai satu-satunya wakil sah rakyat Kamboja.

⁶⁴ *Sinar Harapan*, 9 Januari 1982

⁶⁵ *Sinar Harapan*, 2 April 1982

⁶⁶ *Kompas*, 26 Desember 1981

Sementara itu pertemuan segitiga antara ketiga kelompok perlawanan anti Vietnam direncanakan dilanjutkan di Beijing, RRC bersedia menjadi tuan rumah pertemuan ketiga tokoh pejuang Khmer tersebut. Dua kelompok yaitu kelompok Sihanouk dengan kelompok Khmer Merah menyatakan kesediaannya, tetapi Son Sann bersikeras tetap tak mau bersatu dengan Demokrasi Kamboja dalam Pemerintahan Koalisi nanti. Melihat kenyataan ini, maka Sihanouk juga menyatakan menolak bergabung jika hanya dalam koalisi dua pihak yaitu dengan kelompok Khmer Merah, bagaimanapun juga Sihanouk merasa khawatir bahwa kelompok Khmer Merah nantinya dapat melumpuhkan pengikut-pengikutnya.

Menurut pandangan Sihanouk, bahwa suatu koalisi anti Vietnam di Kamboja harus terdiri dari tiga pihak dan apabila Son Sann belum siap, maka koalisi harus menunggu. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, akhirnya pada bulan Juni 1982, pemerintahan Khmer Merah menyatakan setuju atas pembagian kekuasaan dalam Pemerintahan Koalisi Longgar seperti yang diusulkan ASEAN, dan kedua kelompok yang lain akhirnya juga setuju adapun dasar dari koalisi ini adalah "Prinsip Empat Pasa!", yaitu :

- 1) Pemerintahan Koalisi didirikan dalam kerangka legitimasi kenegaraan Republik Demokratik Kamboja,
- 2) Masing-masing anggota koalisi tetap pada identitasnya sendiri,
- 3) Prinsip sama derajat, tidak ada yang lebih berkuasa satu daripada yang lain (non preponderance),

- 4) Keputusan mengenai hal penting harus diambil atas dasar konsensus, terutama yang menyangkut rencana aksi Demokratik Kamboja.⁶⁷

Dalam persetujuan koalisi ini disebutkan akan membentuk empat komite yaitu komite ekonomi-keuangan, komite pertahanan, komite budaya dan pendidikan, komite kesehatan dan sosial, dan dalam setiap komite akan dipimpin seorang ketua dan dua wakil ketua. Dengan adanya pembagian seperti itu diharapkan ketiga pihak akan mendapatkan kursinya masing-masing dalam pemerintahan.

Akhirnya pada tanggal 17 Juni 1982 terbentuk Pemerintahan Koalisi Khmer, dalam pemerintahan ini terdiri dari ketiga kelompok utama pejuang Khmer yaitu KPNLF yang dipimpin Son Sann, kelompok Sihanouk, kelompok Khmer Merah yang berganti nama menjadi Partai Demokratik Kamboja pimpinan Khieu Samphan, kemudian pembentukan pemerintahan ini ditandatangani di Kuala Lumpur pada tanggal 22 Juni 1982.⁶⁸ Pembentukan pemerintahan yang baru ini diumumkan oleh Sihanouk yang sekaligus memproklamkan secara resmi Pemerintahan Koalisi di tanah Kamboja dengan nama Pemerintahan Koalisi Tiga Pihak Demokratik Kamboja (CGDK), selanjutnya dilakukan penandatanganan dokumen, isi dokumen tersebut ialah :

“Tujuan pembentukan Pemerintahan Koalisi adalah memobilisir semua usaha dalam perjuangan untuk membebaskan Kamboja dari agresor Vietnam dengan pandangan untuk mengembalikan negara itu menjadi daulat dan merdeka, juga untuk melaksanakan deklarasi ICK dan resolusi-resolusi Sidang Umum PBB lainnya yang relevan”.⁶⁹

⁶⁷ *Kompas*, 19 Juni 1982

⁶⁸ *Suara Karya*, 19 Juni 1982

⁶⁹ *Sinar Harapan*, 23 Juni 1982

Pangeran Norodom Sihanouk juga berseru kepada pemerintahan dan negara yang bersahabat untuk mendukung perjuangan gerilya yang akan dilakukan nanti. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan perdamaian di Kamboja dan mempertahankannya demi stabilitas di kawasan Asia Tenggara dan dunia, oleh karena itu ia berjanji setelah penarikan mundur semua pasukan Vietnam, maka seluruh rakyat Kamboja akan melaksanakan haknya secara penuh. Dan ini dapat digunakan untuk menentukan nasib sendiri melalui pemilu yang bebas dan rahasia di bawah pengawasan PBB, dan Pemerintahan Koalisi Demokratik Kamboja akan berusaha mempertahankan kursinya di PBB.

Pemerintahan Koalisi Demokratik Kamboja ini berpegang pada prinsip “tripartisme”, sama rata dan tanpa paksaan oleh yang kuat atau lebih besar. Dan masing-masing kelompok dalam Pemerintahan Koalisi akan tetap mempertahankan organisasinya, identitas partainya dan kebebasan untuk bertindak, termasuk hak-hak menerima dan menggunakan berbagai bantuan internasional terutama yang dibikin khusus kepada salah satu kelompok.⁷⁰ Adapun susunan kabinet Pemerintahan Koalisi ini yang disebut Kabinet Dalam :

- 1) Pangeran Norodom Sihanouk ditunjuk sebagai Presiden,
- 2) Khieu Samphan sebagai Wakil Presiden,
- 3) Son Sann diangkat sebagai Perdana Menteri.

⁷⁰ *Sinar Harapan*, 23 Juni 1982

Sementara itu yang menduduki dalam empat komite yang juga merupakan stat koordinator ialah :

- 1) Komite Urusan Ekonomi-Keuangan : Ieng Sary (Partai Demokratik Kamboja), Bour Hell (kelompok Sihanouk), Boun Sai (KPNLF).
- 2) Komite Pertahanan : In Tam (kelompok Sihanouk), Son Sen (Partai Demokratik Kamboja), In Choodeth (KPNLF).
- 3) Komite Pendidikan dan Kebudayaan : Thuch Rinh (Partai Demokratik Kamboja), Chak Saroekun (kelompok Sihanouk), Choy Vy (KPNLF).
- 4) Komite Kesehatan dan Sosial : Dr. Bou Kheng (KPNLF), Dr. Thiounn Thoeum (Partai Demokratik Kamboja), Chakrapong (kelompok Sihanouk).⁷¹

Dari sudut politik dan diplomasi internasional dengan terbentuknya Pemerintahan Koalisi ini akan berguna untuk membuktikan bahwa ada kelompok lain di Kamboja selain kelompok rezim Heng Samrin, di samping itu pihak luar akan lebih mantap dalam memberikan bantuan apapun kepada rezim Demokratik Kamboja yang tidak lagi terdiri dari Khmer Merah saja. Hal ini mengingat banyaknya negara barat yang mengidentikan rezim Demokratik Kamboja dengan Khmer Merah yang telah melakukan tindakan kejam terhadap rakyat Kamboja.

2. Perang Gerilya

Kelompok Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot telah mempersiapkan perang jangka panjang. Pemimpin Khmer Merah, Pol Pot

⁷¹ *Kedaulatan Rakyat*, 13 Juli 1982

dalam suatu sidang kabinetnya mengakui, bahwa mereka masih mengalami kesulitan-kesulitan yang harus mereka hadapi dalam melancarkan satu “perang rakyat” terhadap pemerintahan Heng Samrin yang didukung oleh Vietnam.

Tetapi bagaimanapun juga mereka telah mempersiapkan suatu strategi bagi perjuangan jangka lama dalam menghadapi pemerintahan yang baru berkuasa di Kamboja, oleh karena itu hal ini perlu dipersiapkan matang-matang, karena menurut Ieng Sary sedikitnya telah 40.000 prajurit telah terbunuh semenjak invasi yang dilancarkan Vietnam pada Desember 1978.⁷² Setelah terusir dari Phnom Penh, kelompok Khmer Merah mengadakan peperangan gerilya dalam menghadapi tentara pendudukan Vietnam bersama dengan pasukan Heng Samrin.

Pada akhir tahun 1981 dan awal 1982, pasukan Vietnam mengadakan serangan ofensif yang besar terhadap pasukan Khmer Merah yang waktu itu masih mampu melakukan perlawanan. Penyerangan ini dilakukan Vietnam setelah membangun infrastruktur yang diperlukan seperti lapangan udara, jalan-jalan dan juga dukungan logistik, termasuk persenjataan berat seperti artileri, dan tank-tank. Melihat sarana yang dimiliki seperti itu tentu saja pasukan Khmer Merah merasa kewalahan, maka pasukan ini terpaksa mundur ke wilayah Thailand untuk menyelamatkan diri dari kehancuran, tampaknya pasukan Khmer Merah mengalami kemunduran yang berarti.⁷³ Hal ini terjadi

⁷² *Kedaulatan Rakyat*, 16 Mei 1979

⁷³ Jusuf Wanandi. “ASEAN dan Konflik Indocina”. *Analisa* tahun XII No. 2, Februari 1983, hal. 107

karena kombinasi kekuatan udara dan arteleri Vietnam yang rupanya cukup efektif untuk mengusir pasukan Khmer Merah dari Kamboja.

Setelah terbentuk Pemerintahan Koalisi dari tiga kelompok perlawanan anti Vietnam, perlawanan terhadap pemerintahan Kamboja dukungan Vietnam masih terus dilancarkan. Bahkan mereka mendapat bantuan persenjataan dan diberi pelatihan gerilya oleh RRC untuk melanjutkan perjuangan melawan pendudukan Vietnam dan rezim Heng Samrin.⁷⁴ Pertempuran demi pertempuran terus berlangsung antara pejuang Kamboja melawan pasukan Vietnam, seperti yang telah dilakukan oleh kelompok Khmer Merah dengan dukungan RRC. Mereka berhasil menyerang kubu pertahanan Vietnam di Siem Reap, Kompong Thom, Battambang, dan Pursat, dan gerilya mereka berhasil membebaskan beberapa desa dari kekuasaan Vietnam di daerah Battambang.⁷⁵

Bukan hanya kelompok Khmer Merah yang melancarkan perlawanan, kelompok KPNLF yang dipimpin oleh Son Sann juga melakukan serangan lain yaitu di daerah instalasi-instalasi militer Vietnam di garis belakang. Sementara itu kelompok Sihanouk dengan pasukannya sekitar 60.000 mengalami sukses dalam serangan terhadap tentara Vietnam di beberapa propinsi yang letaknya mengelilingi danau Tonle Sap.⁷⁶

⁷⁴ *Kompas*, 14 Februari 1984

⁷⁵ *Kompas*, 11 Februari 1984

⁷⁶ *Antara*, 27 September 1984

C. Posisi Hubungan RRC dan Uni Soviet terhadap Masalah Pendudukan Vietnam di Kamboja

Tampaknya perebutan pengaruh antara RRC dan Uni Soviet di kawasan Asia Tenggara khususnya di Indocina merupakan faktor yang menambah tajamnya konflik antara Kamboja dengan Vietnam. Memang intensitas persaingan dua negara besar komunis ini semakin meningkat terutama di kawasan Indocina, karena ada kesamaan ideologi dengan negara-negara di kawasan Indocina. Oleh karena itu maka kawasan Indocina lebih menarik perhatian mereka dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya, untuk itu kedua negara komunis ini sama-sama berusaha mendekati negara-negara di kawasan Indocina bahkan kalau perlu menjalin suatu hubungan dekat dengan negara-negara Indocina.

Di satu pihak Uni Soviet memelihara hubungan yang baik dengan Vietnam, sementara hubungan dengan Kamboja dapat dikatakan buruk. Di pihak lain RRC tampaknya juga menjalin hubungan yang akrab dengan Kamboja. Karena setelah Amerika Serikat meninggalkan kawasan Indocina, Uni Soviet berusaha mendekati Kamboja tetapi ternyata tidak berhasil. Usaha Uni Soviet ini tidak berhasil karena pada masa pemerintahan Norodom Sihanouk, Kamboja sudah mendekati RRC sebab Sihanouk takut pada Vietnam yang dianggap haus akan ekspansi teritorial.⁷⁷

Akhirnya Uni Soviet justru berhasil merangkul Vietnam, karena menurut pandangan Uni Soviet Vietnam merupakan negara yang paling besar potensinya untuk menjadi sebuah negara kuat di Asia Tenggara. Hal ini dilihat dari luas

⁷⁷ Usnani Usman. "Negara-negara Besar dan Konflik Kamboja". *Analisa* tahun XIV No. 4, 1985

wilayah dan juga kekuatan militernya, maka Vietnam pasti bisa berkembang menjadi suatu negara yang mempunyai kekuatan regional yang berperan penting dalam percaturan politik, selain itu Vietnam nantinya dianggap juga dapat memelihara keamanan kawasan Asia Tenggara pada umumnya.⁷⁸

Di samping itu dengan terbentuknya koalisi Uni Soviet dan Vietnam diharapkan bagi Uni Soviet, akan mampu mengurung RRC dalam mencari kepemimpinan politik dan ideologi di kawasan Asia Tenggara terutama di Indocina. Sedangkan jika dilihat dari posisi wilayah, RRC justru mempunyai posisi yang strategis dalam peranan di wilayah Amerika Serikat, hal ini dapat terlihat dari letak geografis Asia Tenggara yang dekat dengan wilayah RRC, atau juga karena pertimbangan historis Asia Tenggara yang dipandang sebagai daerah pengaruh RRC pada masa lalu. Pertimbangan ini berdasarkan pada adanya orang-orang di kawasan Asia Tenggara yang disebut Cina Perantauan, selain itu juga adanya gerakan-gerakan komunis yang hidup di beberapa negara Asia Tenggara.

Sebenarnya Vietnam dan RRC pernah menjadi sekutu, yaitu pada saat meletusnya perang Vietnam melawan Amerika Serikat (perang Indocina). Pada waktu itu mereka bersama-sama dengan Uni Soviet memberikan bantuan ekonomi maupun militer, tetapi tampaknya RRC tidak dapat menjalin hubungan khusus dengan Vietnam. Hal ini terjadi karena para pemimpin mereka telah lama terlibat permusuhan sehubungan dengan beberapa masalah teori dan praktek Marxis. Sementara itu Vietnam memandang bahwa Doktrin Revolusi Petani yang dilakukan oleh Mao Tse Tung telah meninggalkan ajaran-ajaran Marxis-Leninis

⁷⁸ *Ibid*

yaitu ajaran yang berdasarkan kelas pekerja, dan karena alasan ini yang menyebabkan Vietnam beralih kepada Uni Soviet.⁷⁹ Maka tak mengherankan bila kemudian Vietnam juga melakukan politik luar negerinya dengan mengikuti garis Soviet, hal ini terlihat dengan adanya pengusiran terhadap 250.000 orang etnis Cina dari wilayah Vietnam pada tahun 1978.⁸⁰

Sementara itu RRC berusaha melaksanakan ajaran Marxis secara murni dan konsekuen sesuai dengan ajaran Mao. Dan Kamboja pada masa pemerintahan Khmer Merah menjalankan ajaran Mao ini dengan sungguh-sungguh karena pemimpin Khmer Merah yaitu Pol Pot adalah seorang penganut ajaran Mao yang setia, ini merupakan salah satu pertimbangan RRC untuk memberikan dukungannya kepada perjuangan kelompok Khmer Merah pada saat merebut wilayah Kamboja kembali dari pemerintahan Lon Nol.

Dalam konflik perbatasan yang terjadi antara Vietnam dengan Kamboja, kedua negara besar komunis yaitu RRC dan Uni Soviet secara tidak langsung telah mencoba berada di belakang masing-masing pihak, RRC memberi prioritas politiknya bagi Kamboja sedangkan Vietnam didukung oleh Uni Soviet. Dan peristiwa pendudukan Vietnam di Kamboja yang didukung oleh Uni Soviet dianggap mengancam kepentingan RRC yaitu mempunyai dan mempertahankan pengaruhnya di kawasan Indocina.

Oleh karena itu pada saat terjadi pendudukan Vietnam di Kamboja, RRC merupakan negara yang terpukul dengan jatuhnya Phnom Penh ke tangan Vietnam. Hal ini wajar karena RRC adalah pendukung Kamboja dalam

⁷⁹ Oct Ovy. "Hubungan Vietnam-RRC dan Prospeknya". *Analisa* tahun XII No. 4, April 1983, hal. 330

⁸⁰ David Bonavia. *Cina dan Masyarakatnya*. Jakarta : Erlangga, 1987, hal. 243

ketegangan di antara dua negara Indocina tersebut. Meskipun begitu sebenarnya pemerintahan Pol Pot terkenal dengan kekejamannya terhadap rakyat dan juga otoriter. Dengan keadaan seperti ini maka banyak menimbulkan ketidakpuasan dikalangan rakyat Kamboja, sehingga pemberontakan mendapat angin di wilayah Kamboja.

Meskipun para pemberontak yang didukung oleh Vietnam sudah menguasai Phnom Penh, tetapi perang demi perang masih saja akan pecah sewaktu-waktu. Hal ini tampak dengan reaksi RRC dan Pol Pot sendiri atas jatuhnya Phnom Penh, RRC pasti tidak akan membiarkan Kamboja dikuasai oleh Vietnam yang juga disetir oleh Uni Soviet. Bahkan Pol Pot telah bersiap-siap melakukan perang gerilya melawan front yang menguasai Kamboja yaitu Front Persatuan Nasional untuk Keselamatan Kamboja, dan RRC di sini juga memberikan bantuan keuangan yang banyak di samping persenjataan yang diperkirakan juga banyak.⁸¹

Beberapa waktu kemudian RRC mengambil keputusan untuk memberi “pelajaran” kepada Vietnam atas ketergantungan kepada Uni Soviet, dan pelajaran yang dimaksud adalah sebuah penyerbuan/agresi ke wilayah Vietnam pada tanggal 18 Februari 1979. Bahkan RRC berhasil menguasai empat ibukota propinsi Vietnam, sebetulnya tindakan ini dilakukan oleh RRC karena merasa semakin terpojok di kawasan Indocina. Apalagi setelah adanya perjanjian yang dilakukan oleh Vietnam dengan Uni Soviet pada tanggal 13 November 1978, dalam perjanjian itu dirasa telah memojokkan RRC dan juga menjepit ruang gerak

⁸¹ *Praba*, Januari III 1979, hal. 5



RRC.⁸² Dengan adanya agresi yang dilakukan oleh RRC tersebut bagi Vietnam dipandang sebagai bukti ancaman RRC di bagian utara dan memperkuat Vietnam untuk minta bantuan pada Uni Soviet, maka Soviet terus terang membantu Vietnam yaitu dengan mengirimkan delapan kapal perang Soviet yang telah ambil posisi di lepas pantai Vietnam. Bukan itu saja sebuah kapal penjelajahan juga dikerahkan dan akan bergabung bersama-sama kapal-kapal Uni Soviet lainnya yang sudah beroperasi lebih dulu.⁸³

Dari peristiwa-peristiwa yang terjadi tersebut, tampaknya masalah pendudukan Vietnam di Kamboja bukan hanya melibatkan dua negara kecil komunis yang terletak di kawasan Indocina tersebut, tetapi juga melibatkan dua negara besar komunis yang berperan serta dalam konflik di antara negara Kamboja dan Vietnam, di samping itu pertentangan kedua negara besar ini juga ikut memainkan peranan dalam perpecahan yang terjadi antara Phnom Penh dengan Hanoi.

D. Posisi Thailand dengan Terjadinya Pendudukan Vietnam di Kamboja

Sebenarnya setelah pecahnya konflik Kamboja dan Vietnam, yang akhirnya mengakibatkan Kamboja menjadi daerah pendudukan Vietnam, negara Thailand menyatakan sikap netral terhadap kedua negara yang sedang berseteru tersebut. Tetapi pada bulan Juni 1980, ternyata Vietnam melakukan serangan

⁸² Dalam perjanjian itu berisi tentang ketentuan mengenai persahabatan dan kerjasama ekonomi dan kebudayaan, tetapi pada salah satu artikelnnya menurut RRC bisa ditafsirkan sebagai "klausula pakta pertahanan" yang dalam praktek Uni Soviet akan turun tangan bila Vietnam mengalami kesulitan (lihat) Budiono Kusumohamidjojo. *Asia Tenggara dalam Perspektif Netralitas dan Netralisme*. (Jakarta : PT. Gramedia, 1985), hal. 8

⁸³ *Praba* Maret I/1979, hal. 5

terhadap pasukan Thailand di perbatasan Kamboja – Thailand, serangan ini dilakukan Vietnam dengan alasan karena Vietnam ingin menghancurkan gerakan perlawanan anti Vietnam yang menyusup ke wilayah Thailand. Hal ini menjadi pertimbangan Thailand yang menyetujui kebijaksanaan RRC yang telah melakukan tekanan militer di perbatasan dengan Vietnam secara langsung.

Bahkan ada kecenderungan angkatan bersenjata Thailand hanya menggempur tentara Vietnam, sebaliknya terhadap para gerilyawan Kamboja, Thailand bersikap baik bahkan membiarkan para gerilyawan tersebut menyelamatkan diri di wilayahnya. Hal inilah yang menjadi penyebab Vietnam melakukan serangan terhadap Thailand, maka diperkirakan keamanan di perbatasan Thailand – Kamboja akan pulih kembali jika bantuan kepada sisa pasukan Pol Pot dihentikan. Tetapi ternyata Thailand akan tetap berpegang teguh pada resolusi PBB yang menyerukan agar Vietnam menarik mundur pasukannya dari wilayah Kamboja.⁸⁴

Memang terkesan ironis sekali bahwa bangsa Thailand yang anti komunis harus ikut menanggung derita akibat pertikaian yang terjadi dalam kubu kaum komunis sendiri. Tampaknya dengan peristiwa pendudukan Vietnam di wilayah Kamboja ini akan melibatkan banyak pihak terutama negara-negara yang ada di dekat wilayah mereka. Dengan munculnya persoalan tentang perbatasan Thailand – Kamboja, menyebabkan Vietnam semakin bersikeras untuk tetap menduduki Kamboja dengan dalih perbatasan Thailand – Kamboja sedang dalam kondisi tidak aman.

⁸⁴ *Kompas*, 25 Juni 1980

Setelah terbentuk Pemerintahan Koalisi di Kamboja dari kelompok perlawanan anti Vietnam, dan perlawanan massa dilancarkan terhadap pendudukan Vietnam. Perlawanan ini bahkan sampai merembet ke wilayah Thailand, seperti yang terjadi dalam tahun 1984, pasukan Thailand pernah terlibat tembak menembak di wilayah perbatasan timur. Pertempuran ini terjadi ketika 80 orang dari pasukan Vietnam melintasi perbatasan ketika mereka mendesak gerilyawan-gerilyawan Kamboja, tetapi sehari setelah pertempuran pasukan Vietnam ditarik ke wilayah Kamboja.⁸⁵

Posisi Thailand yang menghadapi pelanggaran perbatasan, yang sebelumnya tidak pernah terjadi terhadap lingkungan strategisnya, terpaksa harus masuk ke dalam aliansi informal dengan RRC yang telah memperlihatkan dirinya sebagai satu-satunya negara yang bersedia menggunakan kekerasan untuk menyatakan ketidaksetujuannya terhadap invasi dan pendudukan Vietnam di wilayah Kamboja. Selain itu Thailand berperan sebagai penampung sisa-sisa kekuatan kelompok Khmer Merah, pasukan Khmer Merah ini dapat mencari perlindungan dan akan dipulihkan menjadi kekuatan tempur sebagai suatu instrumen dalam strategi yang lebih luas.⁸⁶

Seperti yang pernah disebutkan bahwa negara Thailand menyetujui kebijaksanaan RRC untuk melanjutkan tekanan militernya terhadap Vietnam, hal ini dilakukan Thailand dengan pertimbangan akan membuat jera Vietnam untuk menyerbu wilayah Thailand. Selain itu Thailand merasa kebijaksanaan RRC ini sebagai cara untuk mengurangi dukungan Cina terhadap Partai Komunis Thailand

⁸⁵ *Sinar Harapan*, 29 November 1984

⁸⁶ Michael Leifer. *Politik Luar Negeri*. (Jakarta : Gramedia, 1986), hal. 238

(CPT) yang merupakan ancaman subversi utama terhadap Thailand.⁸⁷ Di samping itu Thailand juga dapat meningkatkan keamanan dalam negerinya dan mengamankan perbatasannya dengan wilayah Kamboja, dan juga berusaha untuk mencari penyelesaian politik masalah Kamboja. Hal ini dilakukan sebagai suatu usaha untuk memulihkan perimbangan kekuasaan di daratan Asia Tenggara yang telah terganggu dengan adanya pendudukan Vietnam di Kamboja, dan menurut Thailand upaya diplomasi merupakan senjata paling efektif yang dapat digunakan untuk suatu penyelesaian politik serta menjaga stabilitas di antara kekuatan-kekuatan regional.

⁸⁷ Jusuf Wanandi, *op.cit.*, hal. 108

BAB IV

UPAYA PENYELESAIAN MASALAH PENDUDUKAN VIETNAM

DI KAMBOJA

A. Faktor Penghambat Upaya Penyelesaian

Konflik Kamboja bukan semata-mata merupakan konflik antara dua negara tetangga yang saling berbatasan yaitu Vietnam dan Kamboja, tetapi juga menyangkut berbagai persoalan yang bersumber pada sejarah masa lampau dan termasuk peranan negara-negara besar di kawasan ini yaitu RRC, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Keterlibatan negara-negara ini berkaitan erat dengan kepentingan strategi mereka di kawasan Asia Tenggara, oleh karena itu negara-negara ASEAN berupaya untuk mencari jalan keluar guna penyelesaian masalah Kamboja, tetapi upaya ASEAN ini menghadapi beberapa kendala yaitu :

1. Munculnya peranan RRC di wilayah Kamboja dengan mendukung Khmer Merah dianggap usaha-usaha untuk merongrong keamanan Vietnam terutama berkaitan dengan konflik perbatasan. Dan hal ini juga yang dijadikan alasan utama oleh Vietnam sebagai dasar tindakan pendudukan di wilayah Kamboja dan tetap mempertahankan pendudukannya tersebut bila RRC masih mendukung Khmer Merah, selain itu Vietnam juga melakukan pendekatan terhadap Uni Soviet. Sementara itu dengan adanya dukungan Uni Soviet terhadap pendudukan Vietnam di Kamboja ini dianggap mengancam kepentingan RRC, untuk itu RRC tetap mempertahankan dukungannya

kepada kelompok Pol Pot dalam perlawanannya terhadap Vietnam untuk merebut kembali Kamboja.

2. Keputusan RRC untuk memberi “pelajaran” kepada Vietnam dengan melakukan serangan terhadap pasukan Vietnam pada bulan Februari 1979. Keputusan ini justru membuat Vietnam semakin mempertahankan pendudukannya di Kamboja serta memperkuat Vietnam untuk minta bantuan kepada Uni Soviet.
3. Penyerangan Vietnam ke Kamboja menghambat upaya normalisasi hubungan Amerika Serikat – Vietnam, karena jika usaha normalisasi ini berhasil paling tidak upaya penyelesaian masalah Kamboja dapat dilakukan dengan pertimbangan :
 - (a) Amerika dapat memberi bantuan ekonomi yang kemudian akan diikuti Jepang dan negara-negara Barat lain, dan hal ini sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan Vietnam pada Uni Soviet.
 - (b) Setelah dibukanya hubungan diplomatik antara Amerika dan RRC pada tanggal 1 Januari 1979, Amerika diharapkan dapat mendekati dan membujuk RRC untuk mengurangi tekanannya terhadap Vietnam dengan melepaskan dukungannya terhadap Khmer Merah.⁸⁸

Dengan berbagai penghambat tersebut, maka upaya penyelesaian terhadap masalah Kamboja sering menemui jalan buntu. Di samping faktor penghambat tersebut di atas, dari pihak para pejuang Kamboja sendiri juga sering terjadi perbedaan prinsipil.

⁸⁸ Usnani Usman, *op.cit.*, hal. 383

B. Peran ASEAN dalam Upaya Penyelesaian Masalah Kamboja

Setelah Vietnam melakukan serangan besar-besaran di wilayah Kamboja dan kemudian juga menduduki wilayah tersebut, serta akhirnya membentuk suatu pemerintahan “boneka”. Dengan adanya peristiwa-peristiwa ini maka banyak pihak yang merasa dirugikan, persengketaan antara Vietnam dan Kamboja yang tadinya tentang masalah perbatasan. Setelah konflik terjadi sampai akhirnya pecah perang terbuka, yang bukan hanya melibatkan kedua negara bertetangga tersebut karena di belakang kedua negara yang sedang bersengketa itu berdiri dua negara besar komunis yaitu RRC dan Uni Soviet.

Dan semua negara sudah tahu bahwa kedua negara besar komunis ini sama-sama mempunyai kepentingan yaitu menyebarkan pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara khususnya di Indocina. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan banyak negara terutama negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN. Sebenarnya ASEAN tidak secara langsung terlibat dalam konflik di Kamboja, tetapi karena salah satu anggotanya yaitu Thailand merasa menghadapi ancaman langsung dari Vietnam karena pendudukannya atas Kamboja, maka ASEAN mengambil sikap yang pada dasarnya dilandasi oleh simpati pada Thailand.

Masalah pendudukan Vietnam di Kamboja adalah masalah yang kompleks, karena dari dalam negara Kamboja sendiri diharapkan adanya kesatuan di antara bangsa Khmer yang kini terpecah belah. Sedang di luar negeri masalah ini sudah menjadi masalah internasional, karena sudah dibawa ke forum Persatuan Bangsa-Bangsa. Masalah pendudukan Vietnam di Kamboja adalah masalah

Vietnam dengan RRC tetapi memprihatinkan Thailand, karena berbatasan dan tentunya memprihatinkan ASEAN sebab masalah tersebut menyangkut keamanan regional, maka perlu dilakukan upaya penyelesaian yang bertahap.⁸⁹

Dalam bulan Maret 1979, Perdana Menteri Malaysia, Husein Onn bersama dengan Presiden Indonesia, Soeharto menyodorkan tentang “Prinsip Kuatan”. Perdana Menteri Onn menegaskan bahwa Malaysia ingin melihat terciptanya perdamaian abadi di kawasan Indocina berdasarkan Prinsip Kuantan, adapun Prinsip Kuantan itu ialah suatu sikap kepada Vietnam dan Kamboja untuk memberikan kebebasan pada kedua negara tersebut untuk maju dan berkembang dengan damai tanpa campur tangan dan pengaruh dari Uni Soviet dan RRC.⁹⁰ Prinsip ini disodorkan juga bertujuan untuk mencegah kemungkinan ekspansi RRC ke wilayah selatan (dengan tujuan menjadikan Vietnam sahabat dan mencegah Vietnam menjadi bagian blok Soviet).⁹¹

Masalah pendudukan Vietnam di Kamboja telah menjadi masalah internasional, maka dikalangan dunia internasional berusaha untuk mendesak penarikan mundur pasukan Vietnam dari wilayah Kamboja. Dan negara-negara yang merasa perlunya masalah pendudukan Vietnam di Kamboja ini segera diselesaikan adalah negara-negara ASEAN. Karena hal ini menyangkut kepentingan negara-negara ASEAN baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai bagian integral kawasan Asia Tenggara, selain itu konflik di

⁸⁹ *Bernas*, 8 Juli 1983

⁹⁰ *Kompas*, 10 Mei 1980

⁹¹ Leo Suryadinata, *Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto*, (Jakarta : PT. Pustaka LP3ES, 1998), hal. 164

Kamboja telah mengundang campur tangan luar terutama negara-negara besar baik itu secara langsung maupun tidak.

Karena ASEAN merasa berkewajiban untuk menjaga kestabilan kawasan Asia Tenggara, maka masalah pendudukan Vietnam di Kamboja ini dibahas dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri anggota negara-negara ASEAN di Bangkok pada tahun 1979. Mereka mengancam Vietnam yang dapat mengganggu stabilitas, perdamaian, dan keamanan Asia Tenggara, kemudian pada tanggal 14 November 1979, negara-negara ASEAN ini mengajukan resolusi pada Sidang Umum PBB mengenai masalah Kamboja. Dan setelah dilakukan pemungutan suara di lembaga dunia tersebut menghasilkan 91 setuju, 21 menolak, dan 29 abstain, adapun isi dari resolusi tersebut ialah :

- (a) Agar semua pasukan asing ditarik mundur dari Kamboja,
- (b) Agar rakyat Kamboja dapat menentukan nasib masa depan sendiri dan bebas dari pengaruh luar serta perlunya penyelesaian politik,
- (c) Agar semua negara melanjutkan usaha kemanusiaan yaitu membantu rakyat Kamboja serta membantu mengembalikan para pengungsi ke negara asal mereka.⁹²

Negara-negara ASEAN juga menekankan bahwa selama pasukan Vietnam tidak ditarik dari wilayah Kamboja, maka rakyat Kamboja akan sulit mencapai kepentingannya membentuk pemerintahan pilihannya. Untuk itu pada bulan Juli 1981 dilakukan konference internasional mengenai masalah Kamboja (ICK), konferensi ini diselenggarakan di New York dengan ketuanya Menlu Austria,

⁹² Sekretariat ASEAN, *ASEAN Selayang Pandang*, (Jakarta : Deplu RI, 1988), hal. 20

Willbald Pahr di bawah naungan PBB, dan hasil yang dicapai berupa usulan yaitu :

- 1) Persetujuan gencatan senjata oleh semua pihak yang bersengketa di Kamboja, diikuti dengan penarikan mundur pasukan asing dalam waktu singkat di bawah pengawasan pasukan keamanan PBB,
- 2) Kelompok bersenjata di Kamboja tidak boleh menghalangi atau mengganggu pelaksanaan pemilu yang bebas, dan ini harus dihormati hasilnya,
- 3) Pelaksanaan pemilu yang bebas dilakukan setelah penarikan mundur pasukan asing dari Kamboja,
- 4) Pelaksanaan pemilu dilakukan di bawah pengawasan PBB dan semua orang Kamboja berhak ikut dalam pemilu ini.⁹³

Dalam Sidang Umum PBB, negara-negara ASEAN berhasil mempertahankan kursi Demokratik Kamboja, dalam sidang itu ASEAN juga mengusulkan agar diadakan penarikan mundur pasukan asing dari Kamboja.

Semakin lama suara tentang resolusi masalah pendudukan Vietnam di Kamboja semakin meningkat. Dengan begitu semakin bertambah pula dukungan di PBB atas resolusi yang mendukung kedudukan Pemerintahan Demokratik Kamboja di PBB, hal ini berarti makin besarnya dukungan internasional atas upaya penyelesaian politik masalah pendudukan Vietnam di Kamboja.⁹⁴

Selanjutnya ASEAN memprakarsai pertemuan di antara orang-orang Khmer sendiri yang diwakili kelompok Sihanouk, kelompok Son Sann, kelompok Khmer Merah, dan pemerintahan Kamboja dengan Vietnam yang diwakili oleh

⁹³ *Sinar Harapan*, 1 Agustus 1981

⁹⁴ Sekretariat Nasional ASEAN, *op.cit.*, hal. 22

Perdana Menteri Hun Sen. Pertemuan tersebut disebut Pertemuan Informal Jakarta (JIM) yang diketahui oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas dan diselenggarakan di Bogor pada bulan Juli 1988. Peristiwa tersebut merupakan untuk pertama kalinya keempat pihak di Kamboja yang bertikai duduk bersama untuk berunding, walaupun dalam pertemuan tersebut tidak membuahkan hal yang penting.

Pada bulan Februari 1989 diadakan Pertemuan Informal Jakarta II yang diselenggarakan di Jakarta, dan hasil dari pertemuan ini juga sama dengan pertemuan yang pertama yaitu tidak ada kesepakatan dari kelompok-kelompok yang bertikai. Sebenarnya secara prinsip tujuan Hun Sen dan Pemerintahan Koalisi pimpinan Sihanouk sama yaitu menegakkan Kamboja yang bebas, damai, dan non blok, dan pemerintahannya dihasilkan oleh sebuah pemilu yang diikuti oleh seluruh rakyat Kamboja.⁹⁵ Bagi Hun Sen pembubaran pemerintahannya sulit diterima, meskipun pemerintahannya hampir tidak mendapat pengakuan internasional, sebaliknya Pemerintahan Koalisi hanya menguasai sedikit wilayah perbatasan Kamboja – Thailand, selain itu pemerintahan ini mempunyai kelemahan di mata dunia internasional yaitu dengan masuknya Khmer Merah yang dikenal sebagai pembantai rakyat menjadi bagian dari pemerintahan ini.

Upaya penyelesaian masalah pendudukan Vietnam di Kamboja ini bukan saja diupayakan dari pihak orang-orang Kamboja sendiri, tetapi juga harus dari pihak-pihak luar terutama dari para pendukung dari masing-masing kelompok yang bertikai.

⁹⁵ *Tempo* (tajuk), 13 Mei 1989

C.Upaya Internasional dalam Penyelesaian Masalah Kamboja

Masalah penyelesaian pendudukan Vietnam di Kamboja, bagi para pemimpin Kamboja merupakan hal yang cukup sulit, karena Vietnam dianggap hanya mengerti bahasa kekerasan dan tidak terkesan dengan usul atau tuntutan diplomasi. Hal ini disampaikan juga oleh Sihanouk bahwa sebelumnya tiga kelompok perlawanan pernah mengirimkan surat kepada pemerintah Vietnam dalam rangka mencari upaya penyelesaian masalah Kamboja, tetapi ternyata tidak mendapatkan tanggapan yang positif. Walaupun begitu ketiga pemimpin Khmer ini berpendapat bahwa penyelesaian akhir ialah dengan membawa Vietnam ke meja perundingan.⁹⁶

Sedangkan dipihak Vietnam menganggap bahwa adanya ketidakstabilan di kawasan Kamboja merupakan akibat agresi RRC, sementara menurut para pemimpin Thailand bahwa sumber ketidakstabilan itu terletak pada situasi di Kamboja sendiri.⁹⁷ Di samping itu pemerintah Thailand tetap berkeras mendesak Vietnam agar menarik mundur pasukannya dari Kamboja, ini sebagai langkah awal penyelesaian politik sesuai dengan resolusi Majelis Umum PBB, sementara itu Vietnam akan tetap berada di Kamboja sampai ancaman dari RRC sudah berlalu.

Sementara itu terhadap Vietnam, ASEAN akan mengambil langkah-langkah untuk mengadakan dialog dengan negara-negara Indocina dan bukannya konfrontasi. Dalam hal ini Vietnam pernah berjanji dalam lawatannya ke beberapa negara ASEAN (sebelum invasinya ke Kamboja) untuk menawarkan

⁹⁶ *Kompas*, 9 Juni 1980

⁹⁷ *Kompas*, 22 Mei 1980

suatu fakta persahabatan dan berjanji bahwa Vietnam tidak akan mengintervensi persoalan dalam negeri negara-negara lain termasuk Kamboja, tetapi pada kenyataannya Vietnam justru melakukan pendudukan di wilayah Kamboja dengan membentuk pemerintahan “boneka” yang dipimpin oleh Heng Samrin. Di samping itu upaya penyelesaian masalah pendudukan Vietnam di Kamboja ini juga menjadi prasyarat bagi Vietnam untuk bekerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara.⁹⁸

Tampaknya upaya penyelesaian dengan negara-negara yang terlibat dalam masalah Kamboja ini banyak mengalami kendala, tetapi ada perkembangan kearah penyelesaian masalah Kamboja yaitu dari negara Uni Soviet, RRC, dan Vietnam. Pada awal tahun 1988, dimulailah peredaan ketegangan antara Amerika dengan Uni Soviet dilain pihak RRC mulai menjaga jarak dengan Amerika, tetapi tidak sampai menimbulkan ketegangan. Hal ini justru mengubah posisi RRC di mata Uni Soviet, karena bagi Uni Soviet mempunyai hubungan baik dengan RRC memiliki arti penting strategis yang lebih tinggi daripada hanya mempertahankan persekutuan yang kuat dengan Vietnam.⁹⁹

Akhirnya RRC dan Uni Soviet mencapai kesepakatan, dan tiga syarat yang diajukan RRC telah disetujui oleh Gorbachev, adapun syarat tersebut adalah :

1. Uni Soviet harus menarik seluruh pasukannya dari Afganistan.
2. Uni Soviet diminta untuk menghentikan dukungannya kepada pendudukan Vietnam di Kamboja.

⁹⁸ Kompas, 20 Juni 1980

⁹⁹ Rizal Sukma. “Cina dan Asia Tenggara Pasca Kamboja”. *Analisa* tahun XIX No. 6, November 1990

3. Menarik sebagian pasukannya dari sepanjang perbatasan dari RRC.¹⁰⁰

Sementara itu dari pihak RRC sendiri akan menarik 500.000 pasukannya yang bertugas sebagai pengawal perbatasan dengan Kamboja dan Vietnam dan berjanji untuk menghentikan bantuannya kepada Khmer Merah, karena dengan berkurangnya bantuan senjata dapat merangsang penyelesaian politik di Kamboja.

Dengan mulai redanya ketegangan dua negara besar komunis ini maka bagi ASEAN merupakan suatu usaha untuk mengurangi kekuatan militer di kawasan Asia Tenggara, dan juga mulai adanya kecenderungan perbaikan hubungan antara RRC dengan Vietnam. Puncak rujuknya RRC – Vietnam terjadi ketika diadakannya kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri Vietnam, Ngo Dien Linh ke Beijing, pada bulan Januari 1989. Baik Vietnam maupun RRC menunjukkan keinginan berkompromi, dan dalam kompromi tersebut Vietnam bersedia mempercepat penarikan pasukannya dari Kamboja, sedangkan Beijing setuju agar Khmer Merah tidak mengungguli pemerintahan baru di Phnom Penh.¹⁰¹

Sementara itu dari pihak Vietnam bersedia untuk menerima kebebasan non blok dan kenetralan Kamboja, selain itu juga bersedia untuk membicarakan masalah Kamboja dalam rangka membicarakan masalah Asia Tenggara dan ASEAN. Dan dari pihak ASEAN muncul usul Menlu Thailand yaitu tentang penarikan tentara Vietnam dari Kamboja sejauh 30 km dari perbatasan Thailand dengan Kamboja dan dilakukan penarikan secara khusus.

¹⁰⁰ *Tempo*, 20 Mei 1989

¹⁰¹ Juwono Sudarsono. *Politik, Ekonomi, dan Strategi*. (Jakarta : Gramedia, 1995), hal. 59

Walaupun banyak mengalami kendala, ASEAN akan terus berusaha menjadi perantara dalam perundingan-perundingan mengenai masalah Kamboja, karena ASEAN berperan dalam rangka memelihara perdamaian di Asia Tenggara.

E. Penarikan Pasukan Vietnam dari Kamboja

Pihak Vietnam menyatakan bahwa Vietnam akan menarik pasukannya dari Kamboja sesudah pemusnahan persengkongkolan Pol Pot dan sekutunya, selain itu juga bila keamanan Kamboja sudah terjamin, karena Vietnam mempunyai kepentingan yaitu :

1. Mengakhiri ancaman bantuan dan usaha RRC untuk menjadi suatu faktor kekuatan yang penting di Asia Tenggara,
2. Konsolidasi kekuatan di Kamboja oleh suatu rezim yang bersahabat dan dapat diandalkan,
3. Konsolidasi Indocina di bawah kepemimpinan Vietnam terutama dalam politik luar negeri,
4. Netralisasi seluruh Asia Tenggara,
5. Menghindarkan ketergantungan mutlak kepada salah satu kekuatan luar serta mengakhiri isolasi diplomatiknya.¹⁰²

Pada bulan Juli 1982 dan bulan Mei 1983, menurut Perdana Menteri Vietnam bahwa sebagian dari pasukan Vietnam telah ditarik dari Kamboja yaitu

¹⁰² Luhulima. "Hubungan ASEAN – Indocina di Tahun 1990-an". *Analisa* tahun XVIII No. 5, September 1989, hal. 441

sekitar 20.000 tentara.¹⁰³ Pada waktu itu RRC memandang penarikan tersebut hanyalah suatu alih tugas pasukan Vietnam saja, hal itu merupakan umpan yang disajikan kepada negara-negara ASEAN dengan tujuan untuk membujuk ASEAN agar mau mengadakan dialog regional dan melemahkan dukungan ASEAN bagi perjuangan rakyat Kamboja.

Meskipun begitu dalam tahun 1984, Vietnam mulai menarik sebagian pasukannya lagi dari suatu daerah Kamboja Utara dan Barat, penarikan ini mencakup dua brigade, sebuah resimen, dan sejumlah batalyon.¹⁰⁴ Penarikan ini merupakan penarikan pasukan yang ketiga kalinya sejak pasukan Vietnam menjatuhkan rezim Khmer Merah dukungan RRC, kemudian penarikan pasukan yang terakhir dilakukan bulan September 1989, yang jumlahnya sekitar 26.000.¹⁰⁵ Kemudian secara resmi Pemerintah Vietnam menyatakan tidak akan mengirimkan kembali pasukannya ke Kamboja.¹⁰⁶ Setelah pasukan Vietnam ditarik dari wilayah Kamboja bukan berarti masalah di Kamboja telah selesai, karena seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa di antara orang-orang Kamboja sendiri terjadi pertentangan terutama menyangkut pemerintahan di Kamboja pasca penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja.

Upaya selanjutnya adalah diadakannya pertemuan di antara empat wakil kelompok Khmer Merah yaitu Sihanouk, Son Sann, Khieu Samphan, dan Hun Sen, yang kemudian mencapai kesepakatan untuk kelangsungan pemerintahan di Kamboja yaitu dengan terbentuknya Dewan Nasional Agung (SNC).

¹⁰³ *Kedaulatan Rakyat*, 10 Juli 1983

¹⁰⁴ *Merdeka*, 25 Juni 1984

¹⁰⁵ Juwono Sudarsono, *op.cit.*, hal. 52

¹⁰⁶ *Tempo* (tajuk), 23 September 1989

Fenomena dari perubahan-perubahan yang kini terjadi di Asia Tenggara adalah bahwa masalah Kamboja mulai dipandang sebagai masalah internal Kamboja sendiri.



BAB V

KESIMPULAN

Setelah membaca uraian tentang Pendudukan di Kamboja tahun 1979-1989 yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan atau jawaban atas permasalahan yang telah diangkat dalam pendahuluan.

1. Situasi Kamboja menjelang pendudukan Vietnam cukup buruk, hal ini berkaitan dengan pemerintah yang berkuasa pada saat itu yaitu Pemerintahan Demokrasi Kamboja yang dibentuk oleh kelompok Khmer Merah dibawah pimpinan Pol Pot, Ieng Sary dan Khieu Samphan. Kelompok ini mendapat dukungan dari RRC baik dalam hal senjata maupun perencanaan strategi. Pada masa pemerintahan ini banyak rakyat Kamboja yang meninggal baik itu karena dibunuh, sakit, dan juga kelaparan, selain itu mereka juga dikerahkan untuk tanam paksa di daerah pedesaan. Karena dalam melaksanakan pemerintahannya Pol Pot telah bertindak otoriter, maka banyak muncul ketidakpuasan dari rakyat Kamboja. Kemudian timbul pemberontakan-pemberontakan terhadap pemerintahan Pol Pot tersebut, bahkan bawahan Pol Pot sendiri yaitu Heng Samrin juga melakukan pemberontakan. Heng Samrin dibantu oleh pasukan Vietnam dalam melakukan pemberontakannya, selain itu juga dibentuk suatu front yaitu Front Persatuan Nasional untuk Keselamatan Kamboja (KNUFS). Ternyata upaya pemberontakan ini semakin meluas, bahkan akhirnya para serdadu Pol Pot sendiri juga ikut melakukan pemberontakan.

2. Meskipun pasukan Pol Pot mendapat dukungan dari RRC baik itu dalam bentuk persenjataan maupun pasukan sebagai perencana strategi perang, akhirnya dapat ditumbangkan juga oleh Heng Samrin yang didukung oleh Vietnam pada tanggal 25 Desember 1978. Satu bulan kemudian dibentuk Pemerintahan Republik Rakyat Kamboja di bawah pimpinan Heng Samrin dengan dukungan sepenuhnya dari Vietnam dan sejak itu dimulailah pendudukan Vietnam di wilayah Kamboja. Dengan munculnya pemerintahan baru ini ternyata juga menimbulkan rasa tidak puas dari rakyat Kamboja. Pada masa pemerintahan Heng Samrin juga terjadi pemberontakan, merasa bahwa Heng Samrin merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah Vietnam, padahal rakyat Kamboja mempunyai perasaan anti terhadap Vietnam. Setelah Vietnam berhasil menduduki wilayah Kamboja, justru banyak mendapatkan kecaman dari beberapa negara baik itu negara-negara di luar Asia Tenggara maupun dari negara-negara di Asia Tenggara sendiri yang tergabung dalam ASEAN. ASEAN berusaha mengupayakan mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah pendudukan Vietnam di Kamboja ini, oleh karena itu ASEAN mencoba mengajukan resolusi dalam Sidang Umum PBB. Selain itu juga munculnya ide tentang prinsip Kuantan, dan yang akhirnya dilaksanakan oleh para pejuang Khmer adalah tentang pemberontakan Pemerintahan Koalisi longgar. Tiga kelompok utama perlawanan anti Vietnam yaitu Kelompok Sihanouk, Kelompok Khmer Merah, KPLNF setuju dengan usulan tersebut, akhirnya terbentuk juga suatu Pemerintahan Koalisi

Demokratik Kamboja pada tahun 1982. Dalam pemerintahan tersebut, masing-masing kelompok mendapatkan jatah kursinya, yaitu Sihanouk sebagai presidennya, lalu Khieu Samphan dari Khmer Merah sebagai wakil presiden, serta Son Sann dari KPNLF ditunjuk sebagai Perdana Menteri. Setelah pemerintahan koalisi ini terbentuk, perlawanan dengan senjata terhadap Pemerintahan Heng Samrin masih terus dilancarkan. Dalam konflik antara Vietnam dengan Kamboja ini hubungan antara Republik Rakyat Cina dan Uni Soviet ikut berperan terutama menyangkut perebutan pengaruh di antara kedua negara besar komunis tersebut di wilayah Indocina. Negara Thailand yang merupakan negara netral terhadap masalah Kamboja ini akhirnya ikut terlibat dalam masalah Kamboja karena tentara Vietnam sering melanggar perbatasan di Thailand. Alasan Vietnam ialah untuk mencari para penyusup anti Vietnam yang lari ke wilayah Thailand, hal ini menyebabkan Thailand merasa berkepentingan untuk mengusir tentara Vietnam dari wilayahnya.

3. Upaya yang dilakukan ASEAN dalam penyelesaian masalah Kamboja selanjutnya ialah memprakarsai pertemuan di antara orang-orang Khmer sendiri, kemudian diselenggarakan Pertemuan Informal Jakarta pada tahun 1986 dan 1989. Upaya penyelesaian masalah Kamboja bukan saja dilakukan ASEAN, tetapi juga harus diupayakan pihak-pihak yang bersengketa dan juga pihak pendukung. Dengan meredanya ketegangan antara RRC dan Uni Soviet ada kecenderungan perbaikan hubungan antara

RRC dengan Vietnam sampai akhirnya Vietnam memutuskan menarik pasukannya dari wilayah Kamboja.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Bertram, Christoph. *Dunia Ketiga dan Keamanan Dunia* (Jakarta : Bina Aksara, 1988)
- Bonavia, David. *Cina dan Masyarakatnya* (Jakarta : Erlangga, 1987)
- Buttwell, Richard. *Negara dan Bangsa Jilid III* (Jakarta : Widyadasa, 1989)
- Badudu, JS, Sutan Zain. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994)
- Chandler, David. *A History of Cambodia* (Colorado : Westview Press, 1983)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1990)
- Etcheson, Craig. *The Rise and Demise of Democratic Kamphuchea* (Colorado : Westview Press, 1984)
- Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah* (Jakarta : UI Press, 1975)
- Kawilarang, Harry. *Dunia di Tengah Kemelut* (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1975)
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Asia Tenggara dalam Perspektif Netralitas dan Netralisme* (Jakarta : PT. Gramedia, 1985)
- Kartodirdjo, Sartono, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta : Gramedia, 1983)
- Poerwadarminto, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1976)
- Ponchaud, Francois. *Cambodia Year Zero* (New York : Holt Rinehard and Winston, 1978)
- Redaksi Ensiklopedi Indonesia. *Ensiklopedi Indonesia Seri Geografi* (Jakarta : PT. Intermedia, 1990)
- Sekretariat Nasional ASEAN Menteri Luar Negeri Indonesia. *ASEAN Selayang Pandang* (Jakarta : Departemen Luar Negeri Indonesia, 1998)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Suryadinata, Leo. *Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto* (Jakarta.: PT. Pustaka LP3ES, 1998)

Sudarsono, Juwono. *Politik, Ekonomi, dan Strategi* (Jakarta : PT. Gramedia, 1995)

Terbitan Berkala, Surat Kabar, Majalah

Asia Year Book tahun 1980

Antara, 27 September 1984

Dipoyudo, Kirdi. “Konflik Kamboja – Vietnam dan Akar-akarnya”. *Analisa* tahun VIII No. 8, Agustus 1979

Lukman, Bing. “Indocina Sparing Partner ASEAN”. Dalam *Analisa* tahun VII No. 8, Agustus 1977

Luhulima. “Hubungan ASEAN – Indocina di Tahun 1990-an”. *Analisa* tahun XVIII No. 5, September-Oktober 1989

Ovy, Oct. “Hubungan Vietnam-RRC dan Prospeknya”. *Analisa* tahun XII No. 4, April 1983

Race, Jeffrey, dan William Turley. “Vietnam, Cina dan Keamanan Asia Tenggara”. *Prisma* tahun IX No. 4, April 1980

Sutopo, AR. “Beberapa Segi Konflik Vietnam-Kamboja Menuju Hegemoni Kawasan”. *Analisa* tahun VII No. 2, Februari 1978

Sukma, Rizal. “Cina dan Asia Tenggara Pasca Kamboja”. *Analisa* tahun XIX No. 6, November-Desember 1990

Usman, Usnani. “Negara-negara Besar dan Konflik Kamboja”. *Analisa* tahun XIV No. 4, 1985

Wanandi, Jusuf. “ASEAN dan Konflik Indocina”. *Analisa* tahun XII No. 2, Februari 1983

Bernas, 8 Juli 1983

Kedaulatan Rakyat, 16 Mei 1979

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kedaulatan Rakyat, 21 Februari 1981

Kedaulatan Rakyat, 13 Juli 1982

Kedaulatan Rakyat, 10 Juli 1983

Kompas, 4 Januari 1978

Kompas, 17 April 1978

Kompas, 4 Juni 1978

Kompas, 25 Oktober 1978

Kompas, 15 Mei 1979

Kompas, 10, 22 Mei 1980

Kompas, 9, 20, 25 Juni 1980

Kompas, 15 November 1981

Kompas, 25 Desember 1981

Kompas, 19 Juni 1982

Kompas, 11, 14 Februari 1984

Merdeka, 25 Desember 1978

Merdeka, 14-16 Mei 1979

Merdeka, 25 Juni 1984

Praba, Desember III/IV 1978

Praba, Januari III/1979

Praba, Maret I/1979

Suara Karya, 19 Juni 1978

Suara Karya, 11 September 1980

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Suara Karya, 15 September 1981

Suara Karya, 19 Juni 1982

Sinar Harapan, 17 April 1978

Sinar Harapan, 28-29 Juni 1978

Sinar Harapan, 14 Juni 1979

Sinar Harapan, 1 Agustus 1981

Sinar Harapan, 9 Januari 1982

Sinar Harapan, 23 Juni 1982

Sinar Harapan, 29 November 1984

Tempo, 13, 20 Januari 1979

Tempo, 13, 20 Mei 1989

Tempo, 23 September 1989

